



KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Edisi Juni 2020

APBN KITA

KINERJA DAN FAKTA

**#Uangkita Mengantisipasi
Pelemahan Pertumbuhan Ekonomi**

Scan dan Unduh
APBN KITA



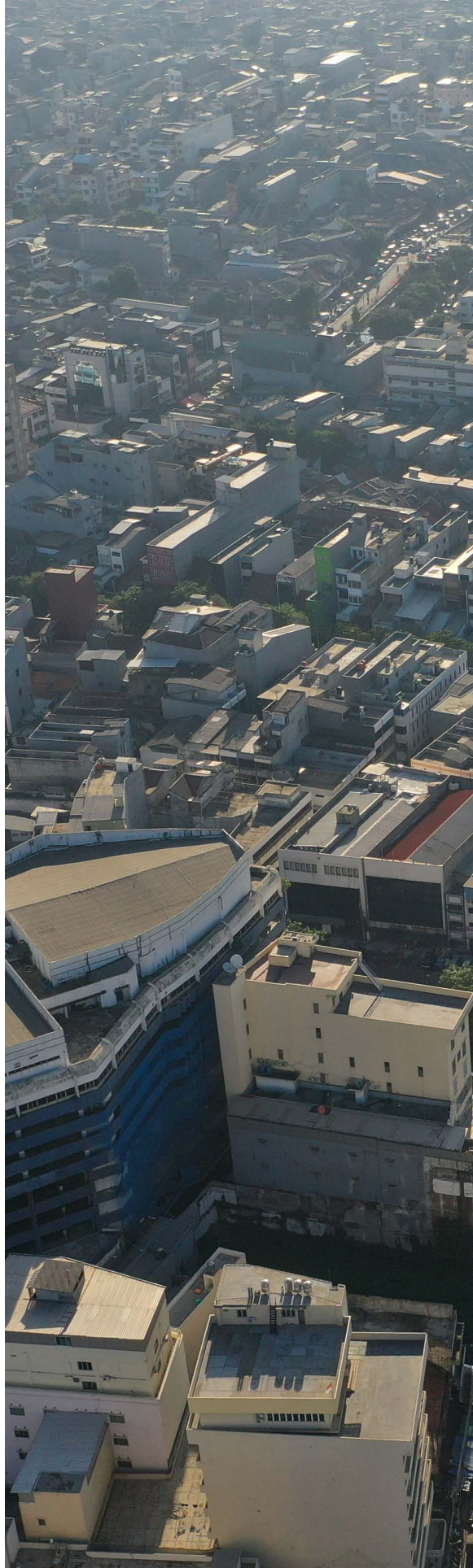


“Harus ada sinergi bersama-sama agar pemerintah mampu melakukan respons yang efektif dan cepat dan tepat namun tidak menyalahi berbagai langkah-langkah maupun tata kelola yang baik”

**Menteri Keuangan,
Sri Mulyani Indrawati**

Daftar Isi

Ringkasan Eksekutif	7
Postur APBN 2020	14
Perkembangan Ekonomi Makro	18
Laporan Khusus	22
Penerimaan Pajak	40
Penerimaan Bea dan Cukai	48
Penerimaan Negara Bukan Pajak	52
Belanja Pemerintah Pusat	58
Transfer Daerah dan Dana Desa	66
Pembiayaan Utang	74





Diterbitkan oleh: Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
Pelindung: Menteri Keuangan dan Wakil Menteri Keuangan.

Pengarah: Pimpinan Unit Eselon I Kementerian Keuangan

Penanggung Jawab: Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko selaku Sekretaris Komite Asset-Liability Management Kementerian Keuangan.

Pemimpin Redaksi: Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi, Direktur Strategi dan Portofolio Pembiayaan, Kepala Pusat Kebijakan Ekonomi Makro.

Dewan Redaksi: Tim Deputies Asset-Liability Management Kementerian Keuangan. **Tim Redaksi:** Tim Kehumasan & Tim Teknis Asset-Liability Management Kementerian Keuangan

Desain Grafis, Layout dan Foto: Biro KLI Kementerian Keuangan.

Alamat Redaksi: Gedung Frans Seda Lantai 8, Jl. Dr. Wahidin Raya No. 1, Jakarta.



Realisasi
Penerimaan
Perpajakan
mencapai **Rp526,23 triliun**, realisasi ini lebih rendah 7,87 persen (yoy), realisasi pada tahun 2019 mencapai Rp571,19 triliun.



Penerimaan Negara
Bukan Pajak
(PNBP) mencatat
realisasi sebesar
Rp136,89 triliun.
Realisasi tersebut
lebih rendah 13,61
persen (yoy) dari
periode yang sama
tahun sebelumnya
sebesar Rp158,46
triliun.



Belanja Pemerintah
Pusat mencapai
Rp537,33 triliun,
tumbuh 1,23 persen
(yoy) dibandingkan
realisasi pada
periode yang sama
tahun sebelumnya
sebesar Rp530,83
triliun.



Transfer ke Daerah
dan Dana Desa
(TKDD) mencapai
Rp306,60 triliun,
lebih rendah
5,69 persen (yoy)
dibandingkan
realisasi pada
periode yang sama
tahun sebelumnya
sebesar Rp325,10
triliun.

Ringkasan Eksekutif

Pandemik Covid-19 masih mewarnai prospek perekonomian global 2020 dimana pada kuartal I pertumbuhan ekonomi beberapa negara utama mengalami kontraksi. Kontraksi di kuartal I 2020 sangat di pengaruhi oleh adanya kebijakan *lockdown* yang berakibat pada penurunan aktivitas ekonomi beberapa negara secara signifikan. Memasuki kuartal II 2020, seiring pelonggaran *lockdown* di beberapa negara secara perlahan-lahan telah memberikan jalan bagi proses pemulihan ekonomi kedepan. PMI manufaktur di beberapa negara meski masih belum dalam level ekspansif, namun telah bergerak naik seiring perbaikan sentimen terhadap proses pemulihan ekonomi. Stabilitas ekonomi nasional masih terjaga dengan indikasi apresiasi nilai tukar rupiah saat ini dan terjaganya

tingkat inflasi. Kebijakan fiskal dan moneter yang dilakukan serta upaya kebijakan *new normal* diharapkan akan memberikan jalan bagi proses pemulihan ekonomi nasional. Upaya pencegahan penyebaran Covid-19, menjaga masyarakat dan sektor usaha terdampak, serta program pemulihan ekonomi nasional masih tetap menjadi prioritas utama.

Sampai dengan akhir bulan Mei 2020 realisasi pendapatan negara dan hibah telah mencapai Rp664,32 triliun atau 37,73 persen dari target pada pagu APBN Perpres 54/2020, namun capaian pendapatan negara dan hibah tersebut tumbuh negatif 9,02 persen (yoy). Secara nominal, realisasi Pendapatan Negara yang bersumber dari penerimaan Perpajakan telah mencapai Rp526,23 triliun dan Penerimaan

Negara Bukan Pajak (PNBP) telah mencapai Rp136,89 triliun, sementara realisasi dari Hibah telah mencapai Rp1,20 triliun. Realisasi penerimaan Perpajakan, PNBP, dan Hibah terhadap pagu APBN Perpres 54/2020 masing-masing telah mencapai 35,98 persen, 45,97 persen, dan 240,22 persen. Berdasarkan pertumbuhannya, penerimaan Perpajakan tercatat tumbuh negatif 7,87 persen (*yoy*) dan PNBP juga tumbuh negatif 13,61 persen (*yoy*).

Secara lebih rinci, realisasi penerimaan Pajak telah mencapai 35,33 persen terhadap pagu APBN Perpres 54/2020. Realisasi dari Pajak Penghasilan (PPh) Nonmigas dan Pajak Pertambahan Nilai/Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPN/PPnBM) secara nominal masih menjadi kontributor utama penerimaan Pajak. Dari sisi pertumbuhannya, Pajak didukung oleh pertumbuhan positif dari penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang tumbuh 16,82 persen (*yoy*), sedangkan komponen penerimaan Pajak yang lain tumbuh negatif. PPh Nonmigas secara nominal capaian realisasinya ditopang utamanya dari penerimaan dari PPh 25/29 Badan, PPh 21, dan PPh Final. Pertumbuhan PPh Nonmigas tercatat negatif 10,38 persen (*yoy*),

namun komponen penerimaan PPh Nonmigas yang bersumber dari PPh Pasal 26 mampu tumbuh 15,60 persen (*yoy*), PPh Pasal 23 tumbuh 6,98 persen (*yoy*), dan PPh Pasal 25/29 OP masih tumbuh 2,41 persen (*yoy*). Sementara itu, penerimaan PPN Dalam Negeri (DN) dan PPN Impor secara nominal masih mendominasi realisasi penerimaan PPN/PPnBM. Berdasarkan pertumbuhannya, PPN/PPnBM dan seluruh komponennya tumbuh negatif. Secara keseluruhan PPN/PPnBM tumbuh negatif 7,95 persen (*yoy*). Pertumbuhan komponen penerimaan Pajak hingga akhir bulan Mei 2020 masih tertekan akibat tren pelemahan ekonomi dan aktivitas perdagangan internasional sebagai dampak pandemi Covid-19, serta pemanfaatan insentif fiskal dalam rangka pemulihan ekonomi.

Realisasi penerimaan Kepabeanan dan Cukai telah mencapai 39,09 persen terhadap pagu APBN Perpres 54/2020. Penerimaan Kepabeanan dan Cukai secara nominal didukung oleh dua komponen utama penerimaannya yaitu penerimaan Cukai dan Bea Masuk (BM). Dilihat dari pertumbuhannya, penerimaan Kepabeanan dan Cukai tumbuh mencapai 12,15 persen (*yoy*) terutama berasal dari penerimaan Cukai

yang tercatat tumbuh 18,54 persen (yoy). Secara lebih rinci, penerimaan Cukai terhadap pagu APBN Perpres 54/2020 telah mencapai 38,54 persen, dimana pertumbuhannya didukung oleh Cukai Hasil Tembakau (CHT) dan Cukai Etil Alkohol (EA) yang masing-masing tumbuh 20,46 persen (yoy) dan 226,99 persen (yoy), sedangkan Cukai Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) tercatat tumbuh negatif. Pertumbuhan CHT didorong oleh dampak kebijakan dari kenaikan tarif cukai. Cukai EA masih mengalami peningkatan yang signifikan karena naiknya permintaan EA untuk bahan baku keperluan medis. Sementara itu, penerimaan BM telah mencapai 40,72 persen terhadap pagu APBN Perpres 54/2020. Pertumbuhan BM tercatat tumbuh negatif 7,86 persen (yoy) ditengah perlambatan yang terjadi pada perekonomian global akibat pandemi Covid-19. Lebih lanjut, komponen penerimaan Bea Keluar (BK), realisasinya telah mencapai 62,13 persen terhadap pagu APBN Perpres 54/2020 dan pertumbuhannya secara kumulatif tumbuh negatif 27,45 persen (yoy). Kontraksi yang cukup dalam pada pertumbuhan pajak perdagangan internasional masih terjadi akibat rendahnya volume impor, penurunan harga komoditas, dan melambatnya aktivitas ekspor

barang mineral nikel dan tembaga sebagai dampak lanjutan wabah Covid-19 di berbagai negara.

Realisasi PNBPN sampai dengan akhir Mei 2020 mencapai Rp136,89 triliun (45,97 persen terhadap pagu APBN Perpres 54/2020).

Pencapaian realisasi PNBPN tersebut terutama didominasi oleh realisasi PNBPN SDA dan PNBPN Lainnya masing-masing sebesar Rp49,26 triliun dan Rp44,10 triliun. Sementara PNBPN dari Kekayaan Negara yang Dipisahkan (KND) dan pendapatan BLU tercatat sebesar Rp24,02 triliun dan Rp19,51 triliun.

Dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, capaian realisasi PNBPN lebih rendah 13,6 persen (yoy) terutama disebabkan oleh penurunan realisasi PNBPN SDA sebesar 24,2 persen (yoy) dan penurunan pendapatan KND sebesar 26,8 persen (yoy).

Penurunan penerimaan SDA antara lain disebabkan rendahnya harga rata-rata ICP periode Desember 2019 – April 2020 (US\$48,81/barel) dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya (US\$60,92/barel) dan menurunnya realisasi HBA periode Januari - Mei 2020 (USD65,36/ton) dibanding periode yang sama tahun 2019 (USD89,10/ton). Sementara itu, rendahnya realisasi PNBPN KND disebabkan karena belum selesainya RUPS pada sebagian

besar BUMN kontributor PNBP dari setoran dividen serta karena adanya pergeseran setoran sisa surplus BI ke pertengahan Juni 2020. Sebaliknya, capaian PNBP lainnya dan pendapatan BLU mengalami pertumbuhan positif. Peningkatan PNBP lainnya ditopang oleh adanya penerimaan akumulasi iuran pensiun (IUP). Sementara, peningkatan pendapatan BLU berasal dari pendapatan dana perkebunan kelapa sawit peningkatan jasa layanan kesehatan pada rumah sakit, dan pendapatan pengelolaan dana pengembangan pendidikan nasional.

Realisasi Belanja Negara sampai dengan akhir Mei 2020 sebesar Rp843,94 triliun atau sekitar 32,29 persen dari pagu APBN Perpres 54/2020. Realisasi Belanja Negara tersebut meliputi realisasi Belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp537,33 triliun dan realisasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa sebesar Rp306,60 triliun. Secara nominal, realisasi Belanja Pemerintah Pusat sampai dengan Mei 2020 tumbuh sebesar 1,23 persen (YoY) dari tahun sebelumnya. Peningkatan kinerja realisasi Belanja Pemerintah Pusat tersebut antara lain dipengaruhi oleh realisasi bantuan sosial yang mencapai Rp78,85 triliun atau tumbuh 30,71 persen (YoY) dibanding tahun sebelumnya.

Pertumbuhan realisasi bantuan sosial di tahun 2020 dipengaruhi oleh penyaluran sebagai program Jaring Pengaman Sosial (JPS) yang dilakukan Pemerintah dalam menghadapi pandemi Covid-19.

Realisasi belanja subsidi sampai dengan akhir Mei 2020 mencapai Rp48,89 triliun atau lebih rendah 3,36 persen dibanding realisasi tahun sebelumnya, terdiri dari subsidi energi sebesar Rp36,43 triliun (74,5 persen) dan subsidi non energi sebesar Rp12,46 triliun (25,5 persen). Apabila dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya, belanja subsidi energi mengalami penurunan 5,06 persen (yoy), sedangkan belanja subsidi non energi justru mengalami kenaikan 1,98 persen (yoy). Penurunan realisasi belanja subsidi energi tersebut terutama dipengaruhi oleh lebih rendahnya realisasi asumsi ekonomi makro yang menjadi parameter perhitungan subsidi, termasuk realisasi volume. Perkembangan ICP dalam periode Januari-Mei 2020 menunjukkan tren penurunan yang cukup tajam, yaitu rata-rata mencapai US\$ 40,51/barel, jauh lebih rendah dibandingkan dengan realisasi ICP Januari-Mei 2019 yang rata-rata mencapai US\$ 63,57/barel. Tren penurunan ICP ini sejalan dengan tren penurunan harga minyak mentah dunia yang dipengaruhi oleh terjadinya

pandemik global Covid-19.

Sementara itu, dari sejumlah Rp12,46 triliun realisasi belanja subsidi non energi, sebagian besar merupakan subsidi pupuk Rp8,05 triliun (64,6 persen) dan subsidi kredit program Rp3,66 T (29,4 persen). Apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2019, belanja subsidi non energi mengalami kenaikan 1,98 persen (*yoy*). Kenaikan cukup tinggi terjadi pada belanja subsidi kredit program sebesar 18,74 persen (*yoy*), sedangkan untuk subsidi pupuk justru mengalami penurunan 0,1 persen (*yoy*). Tingginya kenaikan realisasi subsidi kredit program dipengaruhi oleh meningkatnya jumlah KUR dan perbaikan data serta proses administrasi dalam pencairan subsidi.

Realisasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) sampai dengan Mei 2020 mencapai Rp306,60 triliun atau 40,20 persen dari pagu APBN Perpres 54/2020, yang meliputi Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp277,73 triliun (40,16 persen) dan Dana Desa Rp28,87 triliun (40,55 persen). Realisasi secara lebih rinci, realisasi TKD terdiri dari Dana Perimbangan Rp274,32 triliun (41,74 persen), Dana Insentif Daerah Rp3,21 triliun (23,81 persen), serta Dana Otonomi

Khusus dan Dana Keistimewaan DIY Rp0,20 triliun (0,95 persen).

Realisasi TKDD sampai dengan Mei 2020 lebih rendah sekitar Rp18,49 triliun atau 5,69 persen (*yoy*) apabila dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2019, secara umum hal ini disebabkan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah masih berfokus pada penanganan dan penanggulangan dampak pandemi Covid-19 di Indonesia dan implementasi program pemulihan ekonomi nasional sehingga turut berpengaruh terhadap kinerja penyaluran TKDD. Realisasi TKD sampai dengan Mei 2020 lebih rendah Rp26,93 triliun atau sekitar 8,84 persen bila dibandingkan realisasi TKD pada periode yang sama tahun 2019. Rendahnya realisasi TKD tersebut terutama disebabkan karena: (1) Dana Otonomi Khusus dan Dana Tambahan Infrastruktur dalam rangka Otonomi Khusus belum ada realisasi karena terdapat ketidaksesuaian dari dokumen syarat penyaluran yang telah disampaikan, yaitu adanya perbedaan nilai realisasi penyerapan tahun 2019 antara laporan realisasi yang disampaikan oleh Pemerintah Provinsi dengan laporan hasil reviu APIP daerah. Sementara itu, Dana Keistimewaan DIY lebih rendah 79,38 persen dibandingkan

periode yang sama tahun 2019; (2) realisasi DID lebih rendah 37,89 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya terutama disebabkan masih banyak daerah yang belum memenuhi persyaratan penyaluran DID tahap I di samping itu beberapa Pemda penerima alokasi DID masih berproses melakukan realokasi anggaran untuk penanganan Covid-19 sesuai amanat PMK nomor 19 tahun 2020 tentang Penyaluran dan Penggunaan DBH, DAU, dan DID tahun 2020; serta (3) realisasi DAU lebih rendah 8,63 persen dibandingkan periode yang sama tahun 2019, terutama disebabkan karena mekanisme penyaluran DAU berbasis kinerja sehingga penyaluran hanya dapat dilakukan setelah Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan menerima laporan Belanja Pegawai Pemda serta ditambah laporan Belanja Infrastruktur Daerah, laporan pemenuhan Indikator Layanan Pendidikan, dan laporan pemenuhan Indikator Layanan Kesehatan sesuai dengan PMK nomor 139 tahun 2019 tentang Pengelolaan DBH, DAU, dan Dana Otonomi Khusus. Sementara itu, realisasi penyaluran Dana Desa sampai dengan Mei 2020 sebesar Rp28,87 triliun atau 40,55 persen dari pagu APBN Perpres 54/2020. Sejalan dengan amanah Perppu nomor 1 tahun 2020 dan PMK

nomor 40 tahun 2020 tentang perubahan PMK 205 tahun 2019 tentang Pengelolaan Dana Desa telah mengatur prioritas penggunaan Dana Desa tahun 2020 dapat difokuskan untuk kegiatan penanggulangan pandemi Covid-19 dan pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa.

Pemerintah telah memberikan tambahan belanja stimulus untuk penanganan Covid-19 baik untuk kesehatan, jaring pengaman sosial, dan pemulihan ekonomi nasional.

Secara umum, program penanganan Covid-19 masih menghadapi tantangan, baik dari sisi regulasi, administrasi maupun implementasi di lapangan. Namun demikian, mengingat stimulus ini baru awal dan untuk mendorong akselerasi eksekusi serta mendorong efektivitas program perlu terus diupayakan. Di bidang kesehatan, Pemerintah telah memberikan insentif dan santunan tenaga medis, pelayanan kesehatan bagi pasien rawat inap Covid-19 serta penyediaan sarana prasarana di Rumah Sakit rujukan. Selain itu, dana tambahan belanja digunakan pula untuk program pencegahan/pengendalian Covid-19, pelayanan laboratorium, kefarmasian dan alat kesehatan, serta pengelolaan limbah medis dan penyebaran informasi terkait kesehatan. Selanjutnya,

dalam rangka menyediakan Jaring Pengaman Sosial (*Social Safety Net*), Pemerintah telah merealisasikan bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) sebesar Rp19,1 triliun, kartu sembako sebesar Rp17,2 triliun, kartu prakerja sebesar Rp2,4 triliun, bansos sembako sebesar Rp1,4 triliun, dan bansos tunai sebesar Rp11,5 triliun. Sementara itu, beberapa regulasi untuk mendukung program UMKM, Pembiayaan Korporasi dan Dukungan Pemda masih dalam proses penyelesaian, sehingga belum dapat diimplementasikan secara optimal.

Keberlanjutan fiskal di tahun 2020 diharapkan akan tetap terjaga. Realisasi defisit APBN hingga Mei 2020 mencapai Rp179,62 triliun atau sekitar 1,10 persen PDB.

Sementara itu keseimbangan primer hingga Mei 2020 berada di posisi negatif Rp33,92 triliun. Realisasi pembiayaan anggaran hingga Mei 2020 mencapai Rp356,05 triliun (41,74 persen dari pagu Perpres 54/2020) utamanya bersumber dari pembiayaan utang sebesar Rp360,66 triliun. Realisasi pembiayaan utang tersebut meliputi realisasi Surat Berharga Negara (neto)

sebesar Rp368,97 triliun dan realisasi Pinjaman (neto) sebesar negatif Rp8,31 triliun. Realisasi Pinjaman yang mencapai angka negatif menunjukkan bahwa realisasi pembayaran cicilan pokok pinjaman lebih besar dari pada penarikan pinjaman. Dalam menangani pandemi COVID-19 serta pemulihan ekonomi nasional dibutuhkan pembiayaan yang cukup besar. Namun demikian, Pemerintah senantiasa menjaga pemenuhan aspek kehati-hatian (*prudent*) dan akuntabel serta dimanfaatkan untuk kegiatan produktif dalam memperoleh pembiayaan utang..



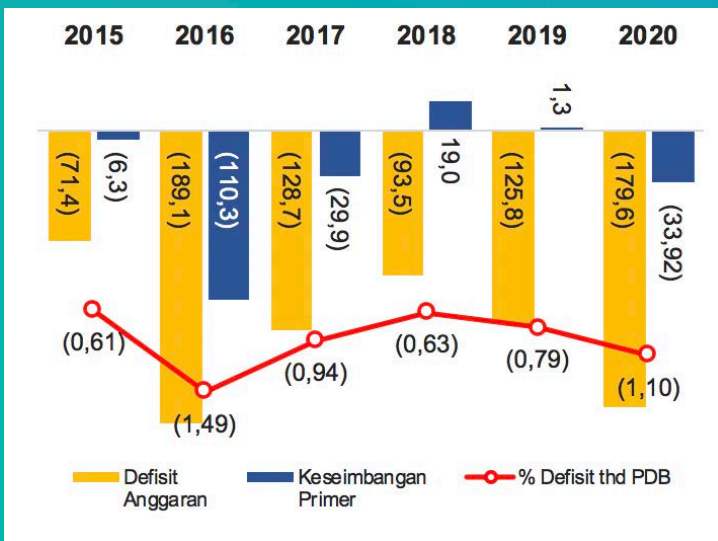
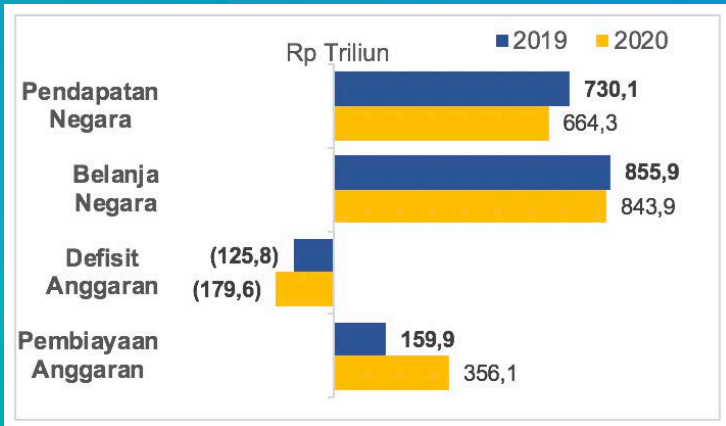
POSTUR APBN

Perkembangan realisasi APBN tahun 2020 sampai dengan 31 Mei 2020 mencatatkan realisasi pendapatan negara lebih rendah 9,02 persen (*yoy*) dan realisasi belanja negara juga lebih rendah 1,40 persen (*yoy*). Dengan kombinasi realisasi tersebut, defisit anggaran sampai dengan 31 Mei 2020 berada pada level 1,10 persen terhadap PDB (tahun 2019 0,79 persen terhadap PDB).

Secara ringkas APBN 2020 sampai dengan 31 Mei 2020 mencatat bahwa realisasi pendapatan negara sebesar Rp664,32 triliun (37,73 persen dari target), lebih rendah dibandingkan periode yang sama tahun 2019 yang mencapai Rp730,14 triliun rupiah. Di sisi lain, realisasi belanja negara mencapai Rp843,94 triliun (32,29 persen dari pagu), lebih rendah dibandingkan periode yang sama tahun 2019

yang mencapai Rp855,92 triliun. Adapun rincian realisasi tersebut meliputi:

- Realisasi Penerimaan Perpajakan mencapai Rp526,23 triliun, realisasi ini lebih rendah 7,87 persen (*yoy*), realisasi pada tahun 2019 mencapai Rp571,19 triliun. Realisasi penerimaan perpajakan terdiri atas:
 - Realisasi Penerimaan Pajak mencapai Rp444,56 triliun, lebih rendah 10,82 persen (*yoy*) dari tahun 2019 sebesar Rp498,51 triliun
 - Realisasi Penerimaan Kepabeanan dan Cukai mencapai Rp81,67 triliun, tumbuh sebesar 12,37 persen (*yoy*) dari tahun 2019 sebesar Rp72,68 triliun.



- Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) mencatat realisasi sebesar Rp136,89 triliun. Realisasi tersebut lebih rendah 13,61 persen (*yoy*) dari periode yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp158,46 triliun.
 - Belanja Pemerintah Pusat mencapai Rp537,33 triliun, tumbuh 1,23 persen (*yoy*) dibandingkan realisasi pada periode yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp530,83 triliun.
 - Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) mencapai Rp306,60 triliun, lebih rendah 5,69 persen (*yoy*) dibandingkan realisasi pada periode yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp325,10 triliun.
- Melihat realisasi pendapatan negara dan belanja negara tersebut, maka realisasi defisit APBN tahun 2020 sampai dengan 31 Mei 2020 mencapai Rp179,62 triliun atau 1,10 persen PDB, dimana keseimbangan primer sebesar negatif Rp33,92 triliun. Di sisi lain, realisasi pembiayaan anggaran sampai dengan 31 Mei 2020 sebesar Rp356,05 triliun, sehingga terdapat kelebihan pembiayaan anggaran sebesar Rp176,43 triliun.

Realisasi Sementara APBN 2020 (triliun Rupiah)

APBN (miliar rupiah)	2019				2020			
	APBN	Realisasi s.d. 31 Mei	% thd APBN	Growth (%)	Perubahan APBN (Perpres 54/2020)	Realisasi s.d. 31 Mei	% thd Perubahan APBN	Growth (%)
A. Pendapatan Negara	2.165.111,8	730.144,7	33,72	6,44	1.760.883,9	664.315,5	37,73	(9,02)
I. Pendapatan Dalam Negeri	2.164.676,5	729.653,0	33,71	6,59	1.760.385,2	663.117,4	37,67	(9,12)
1. Penerimaan Perpajakan	1.786.378,7	571.190,2	31,97	6,04	1.462.629,7	526.227,0	35,98	(7,87)
2. PNPB	378.297,9	158.462,9	41,89	8,64	297.755,5	136.890,4	45,97	(13,61)
II. Penerimaan Hibah	435,3	491,7	112,94	(65,98)	498,7	1.198,0	240,21	143,67
B. Belanja Negara	2.461.112,1	855.921,8	34,78	9,80	2.613.819,9	843.939,3	32,29	(1,40)
I. Belanja Pemerintah Pusat	1.634.339,5	530.826,4	32,48	15,90	1.851.101,0	537.334,6	29,03	1,23
1. Belanja K/L	855.445,8	288.247,5	33,70	24,53	836.535,2	270.569,8	32,34	(6,13)
2. Belanja Non K/L	778.893,7	242.578,9	31,14	7,09	1.014.565,9	266.764,8	26,29	9,97
II. Transfer Ke Daerah dan Dana Desa	826.772,5	325.095,4	39,32	1,12	762.718,9	306.604,7	40,20	(5,69)
1. Transfer Ke Daerah	756.772,5	304.662,6	40,26	1,27	691.528,9	277.734,3	40,16	(8,84)
2. Dana Desa	70.000,0	20.432,8	29,19	(1,09)	71.190,0	28.870,5	40,55	41,30
C. Keseimbangan Primer	(20.115,0)	1.299,4	(6,46)	(93,14)	(517.779,7)	(33.918,2)	6,55	(2.710,37)
D. Defisit	(296.000,2)	(125.777,1)	42,49	34,50	(852.936,0)	(179.623,9)	21,06	42,81
% Defisit thd PDB	(1,84)	(0,79)			(5,07)	(1,10)		
E. Pembiayaan Anggaran	296.000,2	159.925,0	54,03	(10,85)	852.936,0	356.050,9	41,74	122,64
Kelebihan/(Kekurangan) Pembiayaan Anggaran	-	34.148,0			-	176.427,0		



PERKEMBANGAN EKONOMI MAKRO

Perlambatan ekonomi nasional kuartal I 2020 sangat dipengaruhi oleh penurunan aktivitas ekonomi

karena kebijakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) guna mencegah penyebaran wabah Covid-19. Sektor yang mengalami perlambatan dari kondisi tersebut adalah sektor pariwisata, perhotelan, perdagangan, dan manufaktur. Dari sisi pengeluaran, konsumsi Rumah Tangga merupakan faktor utama perlambatan pertumbuhan ekonomi nasional. Kedepan, optimalisasi belanja negara terutama belanja bantuan sosial dan insentif fiskal diharapkan dapat menekan perlambatan pertumbuhan ekonomi di kuartal berikutnya. Di samping itu, pelaksanaan kebijakan *new normal* yang dilaksanakan juga akan mampu membukakan jalan

untuk proses pemulihan ekonomi. PMI manufaktur Indonesia di Mei 2020 meskipun belum dalam zona ekspansif namun meningkat dibandingkan bulan sebelumnya.

Perkembangan inflasi di tingkat konsumen pada Mei 2020 tercatat sebesar 0,07 persen (mtm) menggambarkan inflasi relatif rendah ditengah pelaksanaan Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri. Sehingga, inflasi hingga Mei 2020 adalah sebesar 0,90% (ytd) atau 2,19 persen (yoy).

Relatif rendahnya inflasi Mei 2020 ini dipengaruhi oleh deflasi pada komoditi cabai karena adanya panen, *oversupply* telur ayam ras di tengah rendahnya *demand*, dan *peningkatan* pasokan impor bawang putih. Komponen inti masih melanjutkan tren menurun mencapai 2,65% (*yoy*) yang mengindikasikan kondisi *demand* secara umum melemah akibat

kebijakan PSBB dalam menangani penyebaran Covid-19. Komponen *volatile food* terus menurun sejak Maret 2020 dipengaruhi oleh melimpahnya pasokan serta *demand* yang relatif menurun. Komponen *administered price* meningkat dipengaruhi relaksasi transportasi yang dikeluarkan pemerintah seiring kebijakan new normal serta adanya kebijakan kenaikan sementara tarif batas atas dan bawah angkutan udara untuk pengendalian Covid-19. Dengan realisasi inflasi kumulatif hingga Mei 2020 masih terdapat ruang gerak untuk menjaga inflasi sesuai target 3,1 persen.

Tren nilai tukar Rupiah dolar Amerika Serikat sempat tertekan hingga awal April 2020 seiring dengan tren penguatan dollar index dan guncangan pasar keuangan. Namun, nilai tukar Rupiah dolar Amerika Serikat terhadap kemudian bergerak menguat dan berada pada posisi Rp14.733/USD per 29 Mei 2020. Dengan demikian, nilai tukar Rupiah mengalami apresiasi sebesar 2,8 persen (ytd) dibandingkan akhir April 2020. Rata-rata nilai tukar Januari hingga akhir Mei 2020 tercatat sebesar Rp14.727 per dolar Amerika Serikat. Tekanan di pasar keuangan agak mereda seiring perbaikan sentimen pasar karena adanya pelanggaran *lockdown*

di beberapa negara Eropa yang mendorong sentiment positif investor. Kondisi ini kemudian mendorong *capital inflow* ke *emerging market* termasuk Indonesia sehingga mendorong apresiasi nilai tukar Rupiah. Sementara itu, per akhir Mei 2020, cadangan devisa Indonesia berada pada level yang stabil dan cukup tinggi, yakni sebesar USD130,5 miliar. Posisi ini meningkat dibandingkan dengan posisi akhir April 2020 sebesar USD127,9 miliar, setara dengan pembiayaan 8,3 bulan impor atau 8,0 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah, serta berada di atas standar kecukupan internasional sekitar 3 bulan impor.

Sebagai sektor yang paling terdampak dari wabah Covid-19 adalah sektor pariwisata karena adanya kebijakan *travel ban*. Hal ini terlihat pada jumlah kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) pada Maret 2020 mengalami penurunan signifikan sebesar 64,11 persen (yoy) dibanding jumlah kunjungan pada Maret 2019 atau sebesar 45,50 persen (mtm) dibandingkan Februari 2020. Hingga Maret 2020, jumlah kunjungan wisman ke Indonesia mencapai 2,61 juta kunjungan atau turun 30,62 persen (yoy), lebih rendah dibandingkan kunjungan wisman pada periode sama 2019

yang berjumlah 3,76 juta. Apabila dilihat dari sektor utama terkait pariwisata, yakni perhotelan pada Maret 2020 Tingkat Penghunian Kamar (TPK) hotel klasifikasi bintang mencapai rata-rata 32,24 persen atau turun 20,64 poin.

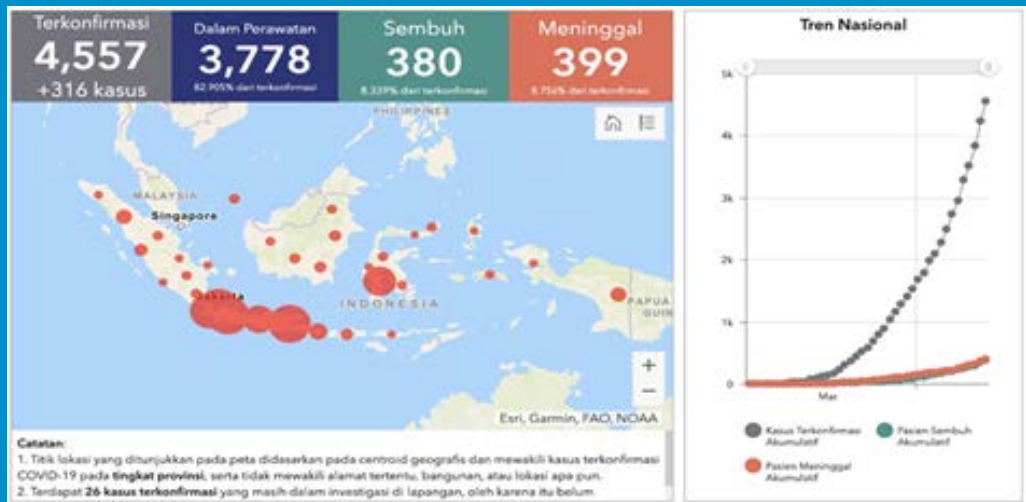
Pada Maret 2019, TPK tercatat sebesar 52,88 persen. Kondisi ini terjadi karena adanya *travel ban* dan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar yang secara langsung mempengaruhi aktivitas masyarakat dan dunia usaha.

Percepatan Pemulihan Ekonomi dan Penguatan Reformasi Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) tahun 2021

Dokumen Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) tahun 2021 telah disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada 12 Mei 2020 sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pemerintah kepada rakyat, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 13 ayat 1 Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Pasal 178 ayat 2 UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Dokumen tersebut merupakan bahan pembicaraan pendahuluan dalam rangka penyusunan

Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) tahun 2021. Secara umum, dokumen KEM PPKF memberikan gambaran awal sekaligus skenario arah kebijakan ekonomi dan fiskal di tahun 2021, berdasarkan perkembangan kondisi dan outlook perekonomian di tahun 2020. Penyusunan Dokumen KEM-PPKF tahun 2021 mengacu pada arah pembangunan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tanggal 20 Januari 2020. Namun demikian, adanya pandemi Covid-19 yang berawal dari Wuhan Tiongkok dan menyebar secara masif di seluruh dunia

Perkembangan Kasus Covid-19 di Indonesia



termasuk Indonesia telah mengancam kesehatan dan kondisi sosial masyarakat dan selanjutnya berpengaruh terhadap perkembangan perekonomian dan sektor keuangan baik dalam skala global maupun nasional. Kondisi ini berpotensi pada tingginya risiko ketidakpastian sehingga telah mengubah baseline dalam perumusan KEM PPKF tahun 2021 dengan beberapa penyesuaian target maupun langkah kebijakan yang perlu dilakukan,

Untuk merespon adanya pandemi Covid-19, Pemerintah telah melakukan upaya pencegahan penyebaran melalui kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang secara langsung berakibat pada penurunan

aktivitas ekonomi dari sisi demand maupun supply. Tingkat konsumsi tertekan, tingkat produksi terkendala, dan rantai pasok global terganggu yang semua berdampak pada penurunan output nasional dan global. Selain itu, pandemi Covid-19 juga mengakibatkan kepanikan di pasar keuangan.

Sebagai upaya penyelamatan kesehatan dan perekonomian nasional, Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 tahun 2020 (Perppu No.1/2020) tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau dalam rangka menghadapi

ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/ atau Stabilitas Sistem Keuangan. Selanjutnya, Perppu No.1/2020 tersebut menjadi landasan hukum bagi Pemerintah dan otoritas terkait untuk mengambil langkah-langkah cepat dan luar biasa (extraordinary actions) dengan tetap memperhatikan prinsip akuntabilitas untuk penanganan pandemi yang diperlukan.

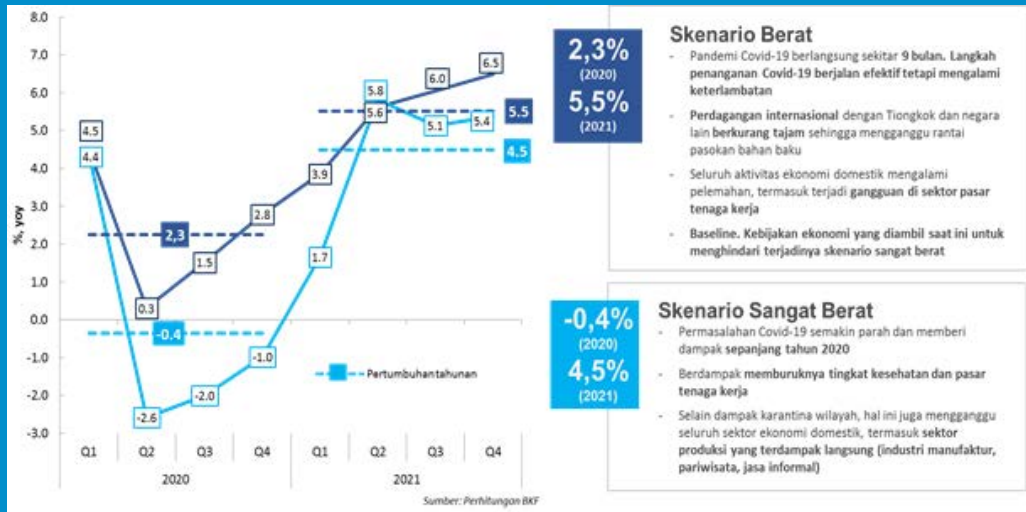
Secara umum, Perppu No.1/2020 mengatur dua hal yakni kebijakan keuangan negara dan kebijakan stabilitas sistem keuangan. Kebijakan keuangan negara yang diatur dalam Perppu tersebut meliputi kebijakan pendapatan negara termasuk kebijakan di bidang perpajakan, kebijakan belanja negara termasuk kebijakan di bidang keuangan daerah, dan kebijakan pembiayaan. Melalui Perppu tersebut, batasan defisit APBN dapat melebihi 3 persen dari PDB selama masa penanganan Pandemi Covid-19 paling lama sampai dengan berakhirnya tahun anggaran 2022. Dengan demikian mulai tahun 2023, besaran defisit akan kembali menjadi paling tinggi sebesar 3 persen dari PDB. Sementara itu, kebijakan stabilitas sistem keuangan meliputi kebijakan untuk penanganan permasalahan lembaga keuangan yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan.

Pemerintah melakukan pemantauan perkembangan implementasi

kebijakan secara terus-menerus untuk memastikan bahwa upaya penanganan Covid-19 berjalan efektif. Kecepatan dan efektivitas penanganan Covid-19 akan mengakselerasi pemulihan aktivitas ekonomi dan meminimalisir dampak negatif terhadap perekonomian. Ketidakpastian yang tinggi terhadap eskalasi penyebaran Covid-19 serta rambatan dampaknya terhadap aktivitas sosial, ekonomi dan keuangan menjadi tantangan dalam melakukan estimasi tingkat pertumbuhan ekonomi yang akurat.

Berdasarkan perkembangan kondisi perekonomian Indonesia hingga triwulan I tahun 2020, Pemerintah memproyeksi pertumbuhan ekonomi berada dalam rentang dua kondisi skenario, yakni skenario berat dengan pertumbuhan sebesar 2,3 persen dan skenario sangat berat dengan pertumbuhan -0,4 persen. Dengan langkah kebijakan PSBB di berbagai wilayah serta eskalasi pandemi Covid-19 yang belum diketahui kapan berakhirnya, kinerja pertumbuhan ekonomi nasional diperkirakan akan semakin tertekan di sepanjang tahun 2020 dan mengarah pada kondisi skenario sangat berat. Dua skenario tersebut menjadi baseline baru dalam memperkirakan kinerja perekonomian Indonesia di tahun 2021

Skenario Pertumbuhan Ekonomi 2020 dan Proyeksi 2021



Skenario Berat

- Pandemi Covid-19 berlangsung sekitar 9 bulan. Langkah penanganan Covid-19 berjalan efektif tetapi mengalami keterlambatan
- Perdagangan internasional dengan Tiongkok dan negara lain berkurang tajam sehingga mengganggu rantai pasokan bahan baku
- Seluruh aktivitas ekonomi domestik mengalami pelemahan, termasuk terjadi gangguan di sektor pasar tenaga kerja
- Baseline. Kebijakan ekonomi yang diambil saat ini untuk menghindari terjadinya skenario sangat berat

2,3%
(2020)
5,5%
(2021)

Skenario Sangat Berat

- Permasalahan Covid-19 semakin parah dan memberi dampak sepanjang tahun 2020
- Berdampak memburuknya tingkat kesehatan dan pasar tenaga kerja
- Selain dampak karantina wilayah, hal ini juga mengganggu seluruh sektor ekonomi domestik, termasuk sektor produksi yang terdampak langsung (industri manufaktur, pariwisata, jasa informal)

-0,4%
(2020)
4,5%
(2021)

Outlook perekonomian di tahun 2020 yang memburuk tersebut perlu dimitigasi dengan langkah kebijakan yang cepat dan antisipatif (*forward looking*). Pemerintah menyadari, pemulihan kesehatan adalah prioritas dan prasyarat terjadinya pemulihan ekonomi. Oleh karena itu, Pemerintah melakukan realokasi dan re-focusing APBN 2020 yang diarahkan pada tiga prioritas utama yaitu: (1) penanganan kesehatan, (2) jaring pengaman sosial untuk melindungi masyarakat miskin dan tidak mampu, serta (3) menjaga daya tahan dunia usaha dan mendukung pemulihan aktivitas ekonomi. Untuk merespon kondisi darurat, APBN 2020 menjadi lebih fleksibel dengan adanya tambahan anggaran belanja dan pembiayaan sebesar Rp405,1 triliun sehingga

terjadi pelebaran defisit mencapai 5,07% PDB. Tambahan belanja tersebut terdiri dari biaya penanganan Covid-19 sebesar Rp255,1 triliun dan dukungan pembiayaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional sebesar Rp150 triliun.

Ditengah tantangan dalam penanganan pandemi Covid-19, Pemerintah juga tidak kehilangan fokus terhadap masalah-masalah fundamental ekonomi jangka menengah dan panjang agar terus bergerak maju menuju negara maju sesuai Visi Indonesia 2045. Indonesia perlu melakukan reformasi untuk keluar dari Middle Income Trap (MIT) melalui peningkatan produktivitas dan daya saing. Dalam meningkatkan produktivitas, hal terpenting yang perlu dilakukan adalah

memperbaiki gap infrastruktur dan meningkatkan kemampuan adopsi teknologi. Sedangkan untuk meningkatkan daya saing, upaya yang perlu dilakukan adalah perbaikan iklim usaha yang kurang kondusif untuk investasi, birokrasi dan regulasi yang belum efisien, serta high cost economy yang menghambat daya saing ekspor. Hal terpenting lainnya adalah kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) atau tenaga kerja menjadi bagian sentral dalam program peningkatan produktivitas maupun daya saing Indonesia. Presiden telah memberikan 5 (lima) arahan strategis sebagai upaya keluar dari MIT, yakni (i) pembangunan kualitas SDM, (ii) melanjutkan pembangunan infrastruktur, (iii) reformasi birokrasi, (iv) penyederhanaan regulasi, serta (v) transformasi ekonomi.

Dengan mempertimbangkan perkembangan dan risiko ketidakpastian, potensi pemulihan ekonomi global dan nasional, Pemerintah mengusulkan kisaran indikator ekonomi makro yang digunakan sebagai dasar penyusunan RAPBN 2021 adalah sebagai berikut: pertumbuhan ekonomi 4,5-5,5 persen; inflasi 2,0-4,0 persen; tingkat suku bunga SBN 10 tahun 6,67-9,56 persen; nilai tukar Rupiah Rp14.900- Rp15.300/US\$; harga minyak mentah Indonesia US\$40-50/

barel; lifting minyak bumi 677-737 ribu barel per hari; dan lifting gas bumi 1.085-1.173 ribu barel setara minyak per hari.

Pemerintah menyadari bahwa momentum pemulihan ekonomi juga merupakan momentum yang tepat untuk melakukan reformasi dan penguatan fondasi ekonomi untuk tumbuh lebih tinggi. Oleh karena itu, tema kebijakan fiskal tahun 2021 adalah "Percepatan Pemulihan Ekonomi dan Penguatan Reformasi." Tema ini selaras dengan tema Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2021 yaitu "Mempercepat Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Sosial" dengan fokus pembangunan pada pemulihan industri, pariwisata, dan investasi, reformasi sistem kesehatan nasional dan jaring pengaman sosial serta reformasi sistem ketahanan bencana. Fokus pembangunan ini diharapkan mampu menghidupkan kembali mesin ekonomi nasional yang sedang berada dalam momentum pertumbuhan.

Strategi utama yang akan dilakukan dalam upaya pemulihan sosial ekonomi adalah dengan mendorong pemulihan kembali sektor-sektor yang terkena dampak paling besar dan menyerap banyak tenaga kerja. Pemerintah telah melakukan

kebijakan countercyclical untuk percepatan penanganan Covid-19 sekaligus akselerasi pemulihan sosial-ekonomi. Secara garis besar respon kebijakan stimulus fiskal tersebut difokuskan untuk pencegahan, pengendalian dan penanganan Covid-19. Berbagai insentif dan stimulus yang dimulai pada 2020 dapat terus dijalankan untuk mempercepat proses normalisasi pasca pandemi Covid-19. Bidang-bidang yang menjadi prioritas pemulihan ekonomi dan sekaligus reformasi adalah kesehatan, perlindungan sosial, pendidikan, Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) dan kualitas belanja APBN.

Sementara itu, program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) diterapkan untuk melindungi, mempertahankan dan meningkatkan keberlangsungan pelaku usaha baik di sektor riil maupun sektor keuangan agar tetap mampu menjalankan usahanya dan terhindar dari pemburukan yang semakin dalam. Modalitas PEN dilakukan melalui Penyertaan Modal Negara (PMN), penempatan dana, investasi pemerintah, dan/atau penjaminan serta skema intervensi lainnya. Langkah-langkah pemberian stimulus melalui PEN tersebut bertujuan untuk membantu pelaku ekonomi bertahan menghadapi dampak Covid-19 untuk

meminimalisir jumlah pemutusan hubungan kerja (PHK), membantu perbankan dalam memberikan relaksasi dan likuiditas serta mencegah terjadinya krisis ekonomi dan keuangan lebih dalam. Melalui berbagai paket stimulus dan program pemulihan ekonomi tersebut, diharapkan penanganan Covid-19 berjalan efektif, proses pemulihan sosial-ekonomi dapat dipercepat sehingga perekonomian nasional dapat terhindar dari krisis lebih dalam.

Reformasi bidang kesehatan diarahkan untuk mendukung percepatan penanganan Covid-19, sinergi/koordinasi Pusat dan Daerah, peningkatan layanan kesehatan termasuk health security preparedness, dan reformasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) untuk mewujudkan Universal Health Coverage (UHC). Reformasi perlindungan sosial diarahkan untuk integrasi dan sinergi antarprogram agar menjamin ketepatan sasaran dan peningkatan efektivitas. Ini menjadi langkah penting untuk menciptakan program perlindungan sosial yang komprehensif, berbasis siklus hidup, termasuk untuk mengantisipasi aging population.

Tantangan yang dihadapi dalam bidang pendidikan antara lain

adalah skor PISA yang terus menurun sejak 2009, kompetensi guru antarprovinsi belum merata, dan porsi perhatian golden moment Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) belum memadai, serta adanya mismatch antara pendidikan keterampilan dengan kebutuhan dunia kerja. Reformasi bidang pendidikan diarahkan pada peningkatan kualitas pendidikan nasional antara lain dengan transformasi kepemimpinan sekolah; transformasi pendidikan dan guru; penyederhanaan kurikulum; adopsi standar global dan pengokohan karakter bangsa; serta kemitraan pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat sipil.

Langkah-langkah penanganan Covid-19 menunjukkan betapa pentingnya sinergi fiskal antara pusat dan daerah dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Sebagai bagian dari keuangan negara, keuangan daerah mempunyai tanggung jawab yang sama dalam mendukung tujuan nasional. Volume TKDD yang terus meningkat dari tahun ke tahun harus diikuti dengan perbaikan pelayanan publik di seluruh daerah. Fakta bahwa masih terdapat kesenjangan dalam penyediaan pelayanan dasar publik

antardaerah dan ketimpangan pembangunan merupakan latar belakang pentingnya reformasi pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa agar tercapai konvergensi pencapaian pembangunan nasional.

Realokasi dan refokusing yang telah dilakukan oleh pemerintah pusat maupun daerah di 2020 menyadarkan kita bahwa anggaran belanja APBN dan APBD masih bisa dikelola dengan lebih baik lagi. Reformasi anggaran belanja akan terus dilakukan melalui penajaman fokus prioritas (zero-based budgeting), beorientasi hasil (result-based budgeting), dan perlu alokasi yang bersifat antisipatif (automatic stabilizer) sebagai shock-absorber otomatis dalam menghadapi ketidakpastian.

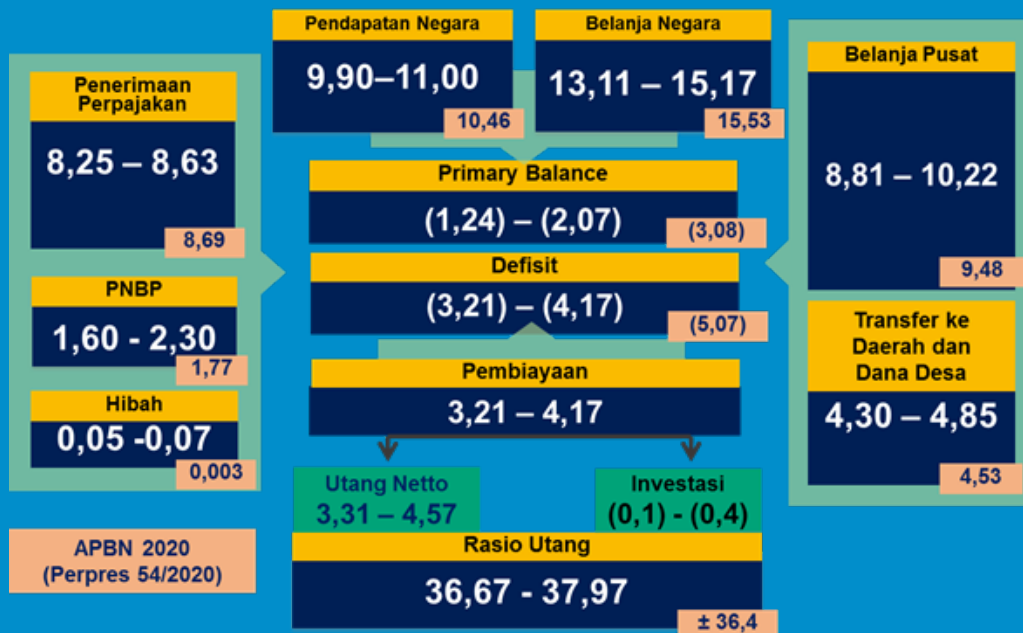
Reformasi di sisi pendapatan negara, dari perpajakan dan PNPB diarahkan untuk mendukung pemulihan dunia usaha dan optimalisasi pendapatan melalui inovasi kebijakan di bidang perpajakan. Kebijakan perpajakan 2021 diarahkan antara lain pada pemberian insentif perpajakan yang lebih tepat serta relaksasi prosedur untuk mempercepat pemulihan ekonomi nasional, penyempurnaan peraturan

perpajakan, optimalisasi penerimaan perpajakan melalui perluasan basis pajak, serta peningkatan pelayanan kepastian dan ekstensifikasi barang kena cukai.

Sejalan dengan berbagai reformasi yang akan dilaksanakan baik di sisi sektoral maupun di sisi fiskal, maka arah kebijakan fiskal tahun 2021 adalah ekspansif

yang konsolidatif secara bertahap dalam jangka menengah. Arah kebijakan fiskal tersebut diharapkan dapat mengakselerasi proses pemulihan sosial ekonomi dan sekaligus memperkuat fondasi untuk mendukung transformasi ekonomi menuju Indonesia Maju 2045.

Postur makro fiskal tahun 2021



Pengembangan Sistem National Logistic Ecosystem (NLE)

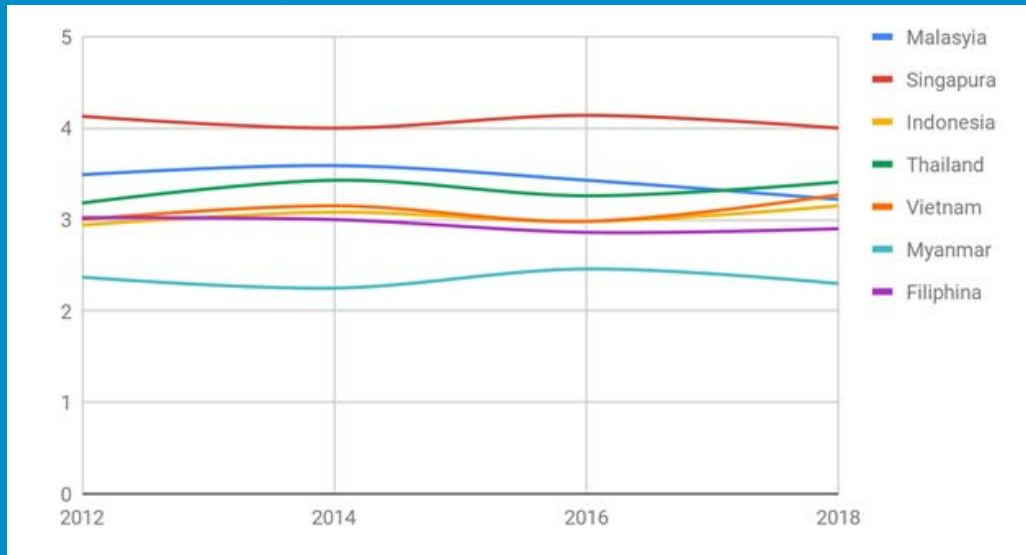
Indeks Logistik Global atau Logistic Performance Index yang selanjutnya ditulis LPI merupakan lembaga survei yang dirilis Bank Dunia untuk mengukur kinerja logistik Negara-negara di dunia. Ada 160 negara di dunia yang menjadi fokus perhatian lembaga ini. Sistem logistik yang efisien dan berkinerja baik merupakan faktor utama peningkatan pertumbuhan ekonomi secara nasional.

Terdapat beberapa komponen yang menjadi ukuran indeks LPI diantaranya adalah efisiensi pengurusan di sektor Bea dan Cukai, kualitas infrastruktur perdagangan dan transportasi, kemudahan mengatur pengiriman barang internasional dengan

harga kompetitif, kompetensi dan kualitas pelayanan logistik, kemampuan pelacakan dan penelusuran barang, dan ketepatan waktu pengiriman barang atau jasa.

Kinerja logistik Indonesia yang berada diperingkat 5 setelah Vietnam, adalah pemicu untuk memperbaiki kinerja logistik nasional. Kinerja logistik yang baik akan tidak hanya mendorong peningkatan daya saing, tapi juga syarat untuk memenangkan persaingan. Pengelolaan jasa logistik yang terintegrasi, diyakini akan menekan biaya logistik menjadi lebih murah. Indonesia harus belajar dari Singapura, yang bertengger di lima besar Negara-negara dunia dengan Indeks

Logistic Performance Index ASEAN



kinerja Logistik yang tergolong sangat baik.

Sistem logistik yang baik memiliki peran strategis untuk menyelaraskan kemajuan antar sektor ekonomi dan antar wilayah demi terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang inklusif, sekaligus menjadi benteng bagi kedaulatan dan ketahanan ekonomi nasional (national economic authority and security).

Dari rumusan persoalan diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa yang mesti dilakukan Indonesia tidak hanya sekedar peningkatan daya saing, melainkan harus ada terobosan baru yang mampu mewujudkan peningkatan ranking Indonesia. Dalam konteks

persaingan diantara Negara-negara Asia Tenggara harus ada terobosan/pendekatan yang berbeda untuk mencapai hasil yang berbeda.

Permasalahan klasik

Pemerintah sejak 5 tahun terakhir mengejar ketertinggalan di bidang infrastruktur dengan memberikan perhatian lebih pada pembangunan infrastruktur di seluruh negeri, bahkan di APBN 2020 anggaran infrastruktur naik 4% lebih menjadi Rp 423,3 triliun.

Infrastruktur fisik seperti jalan, jembatan, terminal, bandara, pelabuhan akan menciptakan konektivitas yang baik yang dapat menghubungkan sentra – sentra produksi dengan jalur distribusi,

mempermudah akses ke tempat- tempat destinasi wisata, dan akhirnya dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang merata di berbagai wilayah di Indonesia.

Selain membangun konektivitas fisik, pemerintah juga terus memperluas konektivitas digital berupa perluasan jaringan internet. Pada tahun 2020, pembangunan palapa ring akan menyasar 57 kabupaten/kota dengan BTS 2.100 Last Mile.

Konektivitas fisik dan konektivitas digital ini hanyalah modal awal, karena perlu diikuti kebijakan-kebijakan lanjutan agar dapat menarik investasi dan meningkatkan daya saing dapat terwujud. Berkenaan dengan hal ini, pemerintah memandang penting untuk segera mengeluarkan kebijakan yang dapat mengakselerasi penerimaan manfaat bagi dunia industri.

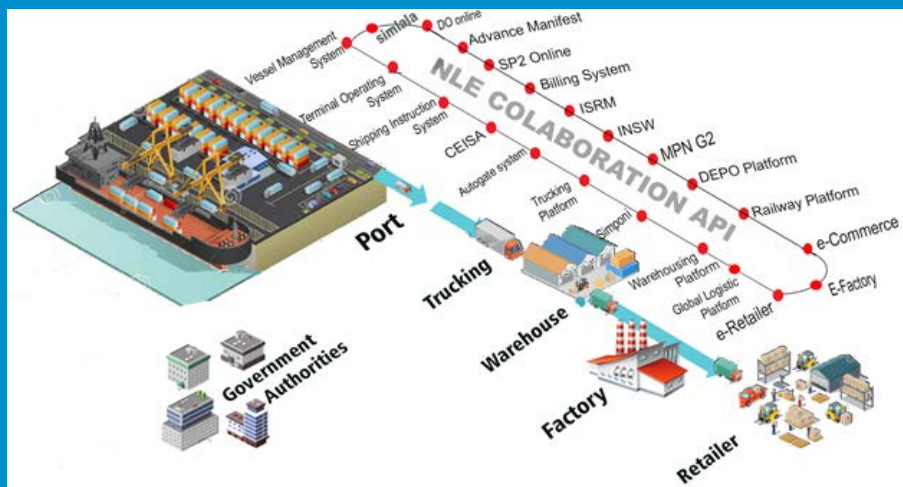
Salah satu kebijakan pemerintah dibidang ekonomi adalah perbaikan kinerja logistik nasional melalui pengembangan sistem

logistik nasional. Tujuannya tidak lain adalah untuk menekan terjadinya biaya logistik yang tinggi dibanding dengan negara lain.

Tingginya biaya logistik, antara lain disebabkan belum adanya platform digital. Platform yang akan mempertemukan pelaku usaha sektor logistik di sisi permintaan (demand) dan sektor logistik di sisi persediaan (supply), sehingga timbul informasi asimetris.

Permasalahan di bidang logistik nasional adalah belum terintegrasinya sistem arus barang dan dokumen mulai dari proses pre clearance kedatangan kapal, proses clearance dan post clearance. Masing-masing authority memiliki sistem-sistem terpisah yang membuat adanya proses bisnis yang kurang efisien akibat duplikasi data dan repetisi proses logistik.

Sistem Logistik Nasional



NLE efisiensi biaya logistik

Dengan adanya sistem NLE diharapkan memberikan manfaat bagi pelaku usaha terutama dalam hal efisiensi biaya logistik beberapa sektor. Pertama adalah B2G (Business to Government), sebelum adanya NLE terdapat duplikasi proses dalam pemenuhan kewajiban pengguna jasa ke pemerintah dimana masing-masing K/L mewajibkan pengguna jasa untuk mengirimkan data sesuai regulasi masing-masing. Dengan adanya NLE maka pemenuhan kewajiban dapat dilakukan dalam satu kali submit ke dalam sistem NLE dan data akan diteruskan ke K/L terkait. Sehingga target manfaat yang didapatkan di sektor B2G ini salah satunya adalah mengurangi duplikasi dan repetisi di sektor B2G (reduce duplication).

Keduanya melalui B2B (Business to Business), dimana manfaat yang diharapkan dengan adanya sistem NLE di dunia bisnis adalah adanya efisiensi kinerja logistik melalui fitur:

1. Idle Capacity sharing, contoh informasi ketersediaan space gudang, jadwal keberangkatan kapal, ketersediaan space truck dapat di akses dengan mudah oleh kargo owner.
2. Maximize resource utilization, contoh meningkatkan jumlah round trip ratio, mengurangi lalu lalang truk kosong di jalan.
3. Standarize Price dan Quality, dengan adanya platform yang memberikan informasi harga dan kualitas secara transparans, maka akan ada kompetisi yang memaksa secara tidak langsung pelaku logistik untuk meningkatkan kualitas pelayanan dengan harga pada range yang wajar.
4. Reduce middleman entity, dengan bertemunya supply-side dan demand-side logistik di platform NLE akan mengurangi potensi berkurangnya proses perantara (middle-man) yang berkontribusi pada tingginya biaya logistik di Indonesia.
5. End to End integration, menciptakan sebuah ekosistem untuk menyelaraskan arus lalu lintas barang dan dokumen internasional sejak kedatangan sarana pengangkut hingga barang tiba di gudang. Orientasi pada kerja sama antar instansi pemerintah dan swasta, melalui pertukaran informasi, simplifikasi proses, penghapusan repetisi dan duplikasi, melalui sistem TIK yang mencakup seluruh proses logistik terkait dan menghubungkan sistem-sistem logistik yang telah ada.
6. Meningkatkan ketersediaan dan kualitas suplai, dengan semakin banyak penyedia logistik bergabung ke platform, maka pengguna layanan logistik memiliki banyak pilihan, tidak hanya terpaku pada salah satu atau beberapa penyedia logistik saja.

Pemulihan Ekonomi Nasional, Langkah Pemerintah Menyelamatkan Perekonomian Dan Melindungi Rakyat

Pandemi Covid-19 yang mulai mewabah sejak awal tahun 2020 memberikan efek domino pada aspek sosial, ekonomi, dan keuangan. Penyebaran Covid-19 yang mudah, cepat, dan luas menciptakan krisis kesehatan dengan belum ditemukannya vaksin, obat, serta keterbatasan alat dan tenaga medis. Demi mencegah penyebaran yang lebih luas, Indonesia menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di beberapa wilayah transmisi lokal. Keputusan tersebut menimbulkan konsekuensi berhentinya aktivitas ekonomi di berbagai sektor, tak terkecuali sektor informal. Kinerja ekonomi pun menurun tajam karena konsumsi terganggu diiringi investasi yang terhambat dan kontraksi pada ekspor-impor. Sektor Keuangan pun ikut

bergejolak, kondisi yang penuh ketidakpastian mengakibatkan turunnya kepercayaan diri investor sehingga mereka mengalihkan aset-aset dari investasi yang berisiko ke instrumen investasi lain yang berisiko lebih rendah (*flight to quality*).

Perekonomian global terkontraksi cukup dalam, bahkan beberapa lembaga internasional memproyeksikan terjadinya resesi di berbagai negara. Perekonomian nasional pun tak luput dari perlambatan, perekonomian yang diperkirakan tumbuh sebesar 5,3 persen sebelum Covid-19 menyerang, dikoreksi menjadi tumbuh 2,3 persen dengan skenario berat dan negatif 0,4 persen dengan skenario sangat berat. Koreksi yang cukup signifikan tersebut akan berdampak pada peningkatan angka pengangguran dan

kemiskinan. Untuk menghadapi kejadian ini, Pemerintah perlu mengambil langkah kebijakan *extraordinary* agar pertumbuhan ekonomi dapat terjaga dan dampak terhadap kesejahteraan masyarakat tidak menuju skenario sangat berat.

Salah satu kebijakan *extraordinary* tersebut adalah memprioritaskan dukungan fiskal untuk penanganan Covid-19 di ranah kesehatan dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Pemerintah telah menganggarkan sebesar Rp695,20 triliun untuk biaya penanganan Covid-19 yang terbagi ke dalam beberapa sektor, yaitu: kesehatan Rp87,55 triliun, perlindungan sosial Rp203,90 triliun, insentif usaha Rp120,61 triliun, UMKM Rp123,46 triliun, pembiayaan korporasi Rp53,57 triliun, dan sektoral K/L dan Pemda Rp106,11 triliun. Respon kebijakan fiskal domestik melalui program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) merupakan upaya Pemerintah untuk menggerakkan perekonomian, melindungi, mempertahankan dan meningkatkan kemampuan ekonomi pelaku usaha, baik di sektor riil maupun sektor

keuangan, termasuk kelompok usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM).

Secara umum, program penanganan Covid-19 masih menghadapi tantangan, baik dari sisi regulasi, administrasi maupun implementasi di lapangan. Namun demikian, mengingat stimulus ini baru awal dan untuk mendorong akselerasi eksekusi serta mendorong efektivitas program perlu terus diupayakan. Di bidang kesehatan, Pemerintah telah memberikan insentif dan santunan tenaga medis, pelayanan kesehatan bagi pasien rawat inap Covid-19 serta penyediaan sarana prasarana di rumah sakit rujukan. Selain itu, dana tambahan belanja digunakan pula untuk program pencegahan/pengendalian Covid-19, pelayanan laboratorium, kefarmasian dan alat kesehatan, serta pengelolaan limbah medis dan penyebaran informasi terkait kesehatan.

Selanjutnya, dalam rangka menyediakan Jaring Pengaman Sosial (*Social Safety Net*), Pemerintah telah merealisasikan bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) sebesar Rp19,1 triliun, kartu sembako sebesar

Rp17,2 triliun, kartu prakerja sebesar Rp2,4 triliun, bansos sembako sebesar Rp1,4 triliun, dan bansos tunai sebesar Rp11,5 triliun.

Di sisi lain, pemberian insentif perpajakan bagi dunia usaha masih terkendala jumlah penerima insentif yang belum optimal, sehingga perlu dilakukan sosialisasi yang lebih masif untuk mendorong para wajib pajak yang *eligible* agar mengajukan permohonan insentif. Selanjutnya, beberapa regulasi untuk mendukung program UMKM, Pembiayaan Korporasi dan Dukungan Pemda masih dalam proses penyelesaian, sehingga belum dapat diimplementasikan secara optimal,

Pemerintah terus berupaya melakukan yang terbaik untuk menangani pandemi Covid-19. Program PEN ditujukan untuk memenuhi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dan mendukung pelaku usaha dengan mengedepankan transparansi, akuntabilitas, profesionalisme, dan keadilan. PEN tidak menimbulkan moral hazard, dan memprioritaskan pelaku usaha yang terdampak Covid-19, serta dilakukan dengan berbagi biaya dan risiko dengan seluruh stakeholder. Selain itu, kehati-hatian dalam menjalankan

program PEN ini telah dibekali oleh payung hukum dalam dalam PP 23/2020 sebagai implementasi Pasal 11 PERPPU 1/2020.

Dalam pelaksanaannya, sampai dengan minggu kedua bulan Juni 2020, realisasi setiap kluster adalah sebagai berikut:

- Dukungan kesehatan baru mencapai Rp1,35T (1,54%), terutama disebabkan oleh keterlambatan proses penagihan, proses verifikasi klaim biaya perawatan COVID-19 oleh BPJS Kesehatan, serta proses revisi anggaran.
- Program perlindungan sosial terealisasi relatif baik, yaitu Rp58,37 (28,63%) melalui berbagai bantuan seperti PKH, kartu Sembako, Bansos Jabodetabek, Bansos Non Jabodetabek, Kartu Pra Kerja, Diskon Listrik, dan BLT Dana Desa.
- Insentif usaha baru menjangkau 6,8% wajib pajak (WP) akibat WP yang *eligible* untuk memanfaatkan insentif pajak belum mengajukan permohonan.
- Dukungan UMKM dan pembiayaan korporasi belum ada realisasi, terutama akibat masih penyelesaian skema

dukungan dan regulasi, serta penyiapan data dan infrastruktur IT untuk mendukung operasionalisasi.

- Dukungan sektoral K/L dan Pemda telah terealisasi 3,65% terutama berasal dari program padat karya, sedangkan dukungan Pemda masih dalam proses penyelesaian regulasi.
- Merespon masih relatif kecilnya realisasi program PEN, Pemerintah melakukan:
- Identifikasi faktor penghambat eksekusi dan merumuskan strategi akselerasi eksekusi, khususnya penanganan kesehatan, dukungan UMKM, insentif dunia usaha, serta Pemda.
- Mempercepat penyelesaian regulasi dan simplifikasi prosedur administrasi.
- Segera mengeksekusi program dukungan bagi dunia usaha, baik UMKM maupun korporasi.
- Meningkatkan efektivitas komunikasi publik dalam menyebarluaskan program PEN dan mendapat masukan konstruktif dari masyarakat dan pelaku usaha.

Strategi Pembiayaan APBN melalui Surat Berharga Negara

Tahun 2020 menjadi tahun yang cukup berat bagi hampir seluruh dunia. Penyebabnya, pandemi Covid-19 yang mulai mewabah di awal tahun tepatnya di bulan Maret 2020 di Indonesia tak hanya menyerang kesehatan namun juga mengganggu sistem perekonomian. Indonesia pun tak lepas dari dampak buruk nyata yang ditimbulkan Covid-19 di berbagai lini mulai dari perekonomian hingga kesehatan. Cepatnya penyebaran virus Covid-19 menyebabkan perekonomian Indonesia turun karena banyaknya kebutuhan terutama biaya untuk menangani pandemi ini. Untuk memenuhi kebutuhan penanganan Covid-19, Pembiayaan menjadi salah satu cara untuk menutup defisit APBN karena pendapatan negara belum mampu untuk sepenuhnya membiayai perekonomian yang menurun akibat dari pandemi ini. Namun Pemerintah tetap menerapkan strategi pembiayaan yang oportunistik, terukur dan tetap mengutamakan kehati-hatian (prudent) dalam pengelolaan pembiayaan ini.

Salah satu instrumen untuk memenuhi pembiayaan tersebut adalah Surat Berharga Negara (SBN). Penerbitan SBN dalam rangka pandemi Covid-19 **tidak dilakukan dengan penerbitan khusus untuk**

menangani permasalahan ini atau Pandemic Bonds, melainkan menjadi bagian dari penerbitan SBN secara keseluruhan baik melalui lelang, penempatan khusus (private placement), penerbitan SBN ritel, maupun SBN Valas. Fleksibilitas penambahan SBN dilakukan dengan meng-upsize besaran penerbitan SBN Domestik dan Valas dengan tetap memperhatikan kondisi pasar keuangan.

Selama bulan Mei tahun 2020, Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) telah melakukan lelang SUN reguler sebanyak satu kali pada 12 Mei 2020 dengan total penawaran yang masuk sebesar Rp73,75 triliun dan total nominal yang dimenangkan sebesar Rp20 triliun. Selanjutnya, Pemerintah juga telah melakukan lelang SBSN reguler sebanyak

dua kali yaitu pada tanggal 5 dan 18 Mei 2020. Lelang tanggal 5 Mei 2020 tercatat dengan total penawaran yang masuk sebesar Rp18,11 triliun dan total nominal yang dimenangkan sebesar Rp5,55 triliun, sedangkan untuk tanggal 18 Mei 2020 diperoleh total penawaran yang masuk sebesar Rp18,85 triliun dan total nominal yang dimenangkan sebesar Rp9,55 triliun. Sementara itu, tanggal 6 Mei 2020 Pemerintah melakukan lelang tambahan (Green Shoe Option) sebagai tindak lanjut atas lelang reguler SBSN tanggal 5 Mei 2020 dengan total penawaran yang masuk dan nominal yang dimenangkan sebesar Rp2,275 triliun.

Selain melalui lelang, Pemerintah juga melakukan penerbitan SBN dengan cara private placement, yang direalisasikan pada tanggal 12 Mei 2020. Jenis instrumen SBN yang diterbitkan dengan private placement adalah SUN seri FR0067 dan FR0073 dengan total nilai sebesar Rp 0,8 triliun dan SBSN seri PBS022 dan PBS023 dengan total nilai sebesar Rp 6,175 triliun.

Instrumen SBN lain yang

ditawarkan Pemerintah adalah SBN Ritel, yang ditujukan khusus kepada Warga Negara Indonesia dan diterbitkan secara online. Sejak diterbitkan secara online pada 2018 lalu, SBN ritel online sukses menjadi salah satu instrumen investasi yang paling diminati, khususnya bagi kaum muda. Selain karena aman dan dijamin Undang-Undang,

SBN Ritel Online menawarkan kemudahan dan keuntungan yang tak kalah dengan instrumen investasi lainnya. Saat ini Pemerintah sedang menggodok rencana penerbitan ORI017, SBN Ritel yang mulai ditawarkan pada tanggal 15 Juni sampai dengan 9 Juli 2020. Kupon yang diberikan dalam penerbitan kali ini cukup kompetitif berada di angka 6,40% p.a. (fixed rate) yang akan dibayarkan setiap bulan selama jangka waktu tiga tahun. Masyarakat dapat berinvestasi dan turut berkontribusi terhadap pembiayaan APBN, terutama di masa pandemi ini hanya dengan minimal pembelian sebesar Rp1 juta.

Di sisi lain, Pemerintah juga menerbitkan SBN dengan denominasi valuta asing yaitu USD, EUR, dan JPY. Penerbitan SBN dalam denominasi valuta asing tetap diperlukan sebagai komplementer untuk menghindari crowding out di pasar domestik. Namun masyarakat tidak perlu khawatir karena Pemerintah tetap akan mempertimbangkan penerbitan dengan biaya dan risiko yang seminimal mungkin, serta memprioritaskan pendanaan dalam negeri

KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

Pajak di Era New Normal: Insentif Pajak Lindungi Ekonomi, Pelayanan Tatap Muka Buka Kembali

Penerimaan Pajak

Penerimaan pajak periode Januari – Mei 2020 sebesar Rp444,56 triliun. Dengan target APBN 2020 sebesar Rp1.254,11 triliun, realisasi penerimaan pajak telah mencapai 35,45 persen dari target. Penerimaan pajak mengalami perlambatan seiring dengan mulai terlihatnya dampak pandemi Covid-19 terhadap perekonomian, sehingga bila dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2019 penerimaan pajak mengalami kontraksi sebesar 10,82 persen (*yoy*). Kontraksi terjadi baik atas jenis-jenis pajak PPh, PPN & PPnBM, maupun PBB & Pajak Lainnya. Tekanan penerimaan pada bulan Mei cukup signifikan, yang disebabkan oleh perlambatan kegiatan ekonomi sebagai efek samping pembatasan sosial yang diterapkan untuk menanggulangi pandemi Covid-19, serta pemanfaatan fasilitas

insentif perpajakan yang digulirkan Pemerintah untuk dunia usaha dalam rangka menjaga stabilitas perekonomian di tengah upaya penanggulangan pandemi tersebut.

Bila kita lihat lebih dalam, meskipun secara umum jenis-jenis pajak utama mengalami kontraksi, beberapa jenis pajak utama masih mencatatkan pertumbuhan positif, yakni untuk jenis pajak PPh Pasal 23, PPh Pasal 26, dan PPh Orang Pribadi. Untuk periode Januari – Mei 2020 PPh Pasal 26 masih mencatatkan pertumbuhan *double digit* 14,33 persen (*yoy*). Pertumbuhan ini didorong oleh peningkatan setoran pajak atas dividen, serta tidak terulangnya restitusi dengan nilai signifikan pada bulan Februari 2019. PPh Pasal 23 masih tumbuh positif 6,56 persen (*yoy*) meskipun mengalami tekanan pada

Realisasi Penerimaan Pajak

Uraian	APBN 2020*	Jan- Mei 2020 (Rp)	Δ% '19-20
Pajak Penghasilan (PPh)	703,34	281,81	-12,44
- Non-Migas	659,6	264,83	-10,38
- Migas	43,75	16,98	-35,58
PPN & PPnBM	529,65	159,99	-7,95
PBB dan Pajak Lainnya	21,11	2,76	-3,45
Jumlah	1.254,11	444,56	-10,82

**)Target APBN2020 disesuaikan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020*

penerimaan bulan Mei. Sementara itu, setelah mengalami tekanan penerimaan pada bulan Maret akibat relaksasi jangka waktu pelaporan dan pembayaran SPT Tahunan (Pasal 29), kinerja PPh Orang Pribadi membaik di bulan Mei sehingga kembali tumbuh positif 0,55 persen (*yoy*).

PPh Pasal 21 mengalami kontraksi 5,30 persen akibat tekanan di bulan Mei. Tekanan ini diakibatkan oleh (1) menurunnya serapan tenaga kerja, terutama pada sektor-sektor yang terdampak langsung oleh pandemi Covid-19, dan (2) pemanfaatan insentif fiskal PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah (DTP). PPh Pasal 25/29 Badan mengalami kontraksi 20,46 persen (*yoy*), disebabkan oleh (1) menurunnya profitabilitas tahun 2019 yang menjadi dasar perhitungan angsuran masa, (2) pemanfaatan fasilitas insentif perpajakan dalam bentuk pengurangan angsuran masa, serta (3) penurunan tarif PPh Badan dari 25 persen menjadi 22 persen. PPN Dalam Negeri mengalami kontraksi 2,71 persen (*yoy*) terutama diakibatkan tekanan yang cukup dalam pada bulan Mei setelah sebelumnya mampu tumbuh positif sampai dengan bulan April. Tekanan ini merefleksikan perlambatan penyerahan dalam negeri atas barang kena pajak dan jasa kena

pajak pada bulan April yang jatuh tempo pembayaran pajaknya pada bulan Mei.

Beralih ke pajak-pajak atas impor, untuk periode Januari - Mei 2020 tercatat kontraksi sebesar 17,13 persen (*yoy*). PPN Impor mengalami kontraksi sebesar 14,80 persen (*yoy*), sejalan dengan tren impor Indonesia yang masih menunjukkan penurunan. Nilai impor kumulatif Indonesia Januari – Mei 2020 adalah USD60.146,3 juta atau turun 15,55 persen (*yoy*) dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Hal ini tidak lepas dari pandemi Covid-19 yang berskala global, mengganggu sisi permintaan maupun sisi penawaran dalam perspektif perdagangan internasional. Sementara itu, penerimaan PPh Pasal 22 Impor mengalami kontraksi yang lebih dalam yakni 24,97 persen (*yoy*). Hal ini disebabkan oleh pemanfaatan insentif PPh 22 Impor. Insentif ini lebih luas dibandingkan insentif atas PPN Impor yang hanya diberikan untuk impor alat kesehatan yang digunakan dalam rangka penanggulangan Covid-19.

Penerimaan Sektoral

Dari sisi penerimaan sektoral, seluruh sektor utama penyumbang penerimaan pajak mengalami kontraksi, termasuk untuk sektor yang sebelumnya masih mampu

Penerimaan Jenis-Jenis Pajak Utama (dalam triliun Rupiah)

Jenis Pajak	Realisasi Jan-Mei '20	Δ '19-20
PPh Pasal 21	61,96	-5,30 %
PPh Pasal 23	18,68	6,56 %
PPh Pasal 25/29	95,47	-19,07 %
- Orang Pribadi	7,81	0,55 %
- Badan	87,66	-20,46 %
PPh Pasal 26	17,88	14,33 %
PPh Final	46,39	-2,96 %
PPN Dalam Negeri	94,51	-2,71 %
Pajak atas Impor	80,09	-17,13 %
- PPh 22 Impor	17,90	-24,97 %
- PPN Impor	60,61	-14,80 %
- PPnBM Impor	1,58	-4,18 %

tumbuh positif seperti Industri Pengolahan dan Jasa Keuangan.

Sektor Industri Pengolahan berkontraksi 6,8 persen (*yoy*), tercermin pada Purchasing Manager Index (PMI) Indonesia yang pada bulan Mei berada cukup dalam pada level 28,60 (indeks di atas 50 berarti ekspansi sedangkan di bawah 50 berarti kontraksi). Kondisi ini juga erat kaitannya dengan indikasi indeks PMI mitra-mitra dagang utama Indonesia, yang juga menunjukkan kontraksi. Dari lima teratas mitra dagang utama Indonesia, empat diantaranya mengalami kontraksi yakni Jepang (April 41,9 Mei 38,4), Singapura (April 46,8 dan Mei 27,1), Amerika Serikat (April 41,5 dan Mei 43,1), serta India (April 27,4 dan Mei 30,8). Hanya Cina yang telah mengindikasikan pemulihan kapasitas manufaktur (April 50,8 dan Mei 50,7), mengingat Cina merupakan negara yang pertama kali mengalami pandemi Covid-19, sehingga secara linimasa penanganan pandemi berada lebih awal dibandingkan negara-negara lain, serta telah lebih dulu mencapai *milestone* penambahan nol kasus baru, yakni pada tanggal 22 Mei 2020¹.

Sektor Perdagangan berkontraksi 12,0 persen (*yoy*), diakibatkan oleh perlambatan penyerahan

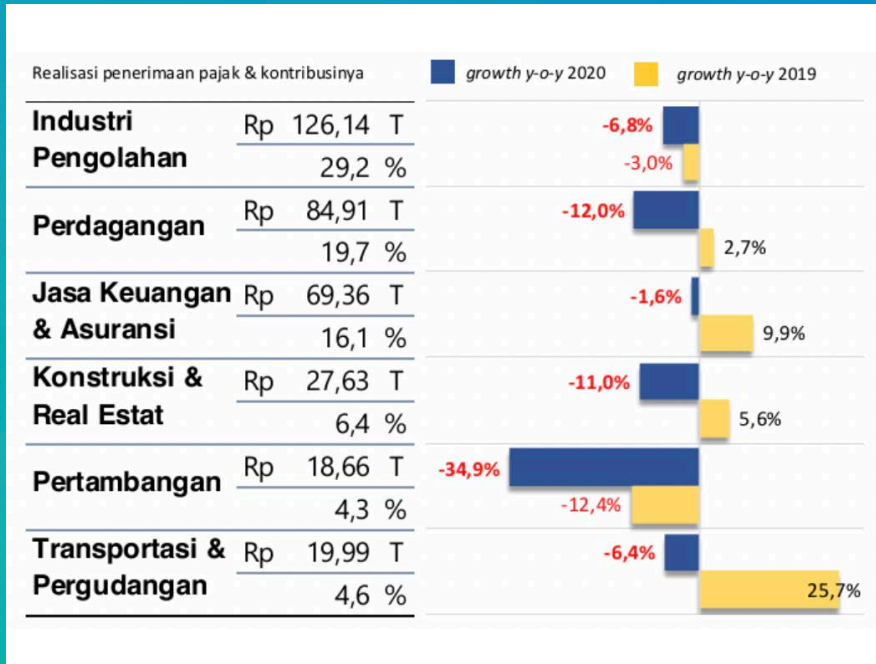
dalam negeri sebagai konsekuensi pembatasan sosial dalam rangka penanggulangan Covid-19, serta kontraksi kegiatan impor sebagai efek dari perlambatan perdagangan internasional. Kinerja Subsektor Perdagangan Besar ditopang oleh usaha-usaha yang memperdagangkan barang esensial, seperti hasil tani dan hewan hidup, perdagangan makanan, minuman dan tembakau, keperluan rumah tangga, serta produk pembersih/kesehatan. Demikian juga kinerja Subsektor Perdagangan Eceran, ditopang toko-toko ritel yang tidak mengandalkan lokasi fisik di pusat perbelanjaan, menjual barang-barang kebutuhan pokok, serta memiliki layanan daring atau pesan-antar. Sedangkan Subsektor Perdagangan Mobil & Motor sempat menunjukkan peningkatan drastis jelang pemberlakuan PSBB, namun kemudian melambat secara cepat, selain terpengaruh negatif oleh batalnya penyelenggaraan *event motorshow* yang biasanya menjadi momen penjualan dan eksposur produk otomotif.

Sektor Jasa Keuangan berkontraksi 1,6 persen (*yoy*) dikarenakan terjadinya penurunan signifikan dari salah satu Wajib Pajak kontributor terbesar sektor. Bila dikecualikan dari perhitungan, sektor ini secara umum masih

1)

www.nbcnews.com/news/world/china-records-no-new-coronavirus-cases-first-time-pandemic-began-n1213691

Penerimaan Sektor-Sektor Utama, Januari – Mei 2020





Pelayanan Perpajakan Tatap Muka

Dibuka **15 Juni 2020**

Layanan berikut, dilakukan **tanpa tatap muka**:

<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pendaftaran NPWP ▪ Pelaporan SPT yang sudah wajib e-filing ▪ Surat Keterangan Fiskal (SKF) ▪ Validasi SSP PPhTB 	dilakukan melalui www.pajak.go.id
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Aktivasi EFIN 	dilakukan melalui email unit kerja
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Lupa EFIN 	dilakukan melalui telepon/email unit kerja atau bring pajak (telepon, twitter, dan live chat)
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Layanan VAT Refund di bandara 	dilakukan melalui email tertentu

Pelayanan tatap muka diberikan dengan memperhatikan **Protokol Kesehatan**

tumbuh 1,64 persen (*yoy*). Penyaluran kredit masih tumbuh namun dengan tren perlambatan, dan sejak Desember 2019 pertumbuhannya lebih rendah dari pertumbuhan DPK. Namun dengan adanya stimulus/kebijakan yang diberikan pada sektor perbankan diharapkan stabilitas sistem keuangan tetap terjaga.

Sektor Pertambangan berkontraksi cukup dalam 34,9 persen (*yoy*) akibat masih terus anjloknya harga minyak dan penurunan permintaan batubara. Sektor Konstruksi & Real Estat berkontraksi 11,0 persen (*yoy*) seiring menurunnya kegiatan konstruksi dan penjualan properti. Sektor Transportasi & Pergudangan berkontraksi 6,4 persen (*yoy*) seiring dengan pembatasan transportasi dan larangan mudik lebaran sebagai tindakan penanggulangan pandemi Covid-19. Kontraksi paling dalam dirasakan oleh Subsektor Transportasi Udara, yang bahkan telah mengalami tekanan sebelum diberlakukannya PSBB, seiring dengan banyaknya negara yang mengeluarkan *travel warning* atas perjalanan-perjalanan bisnis dan wisata ke luar negeri sejak awal tahun.

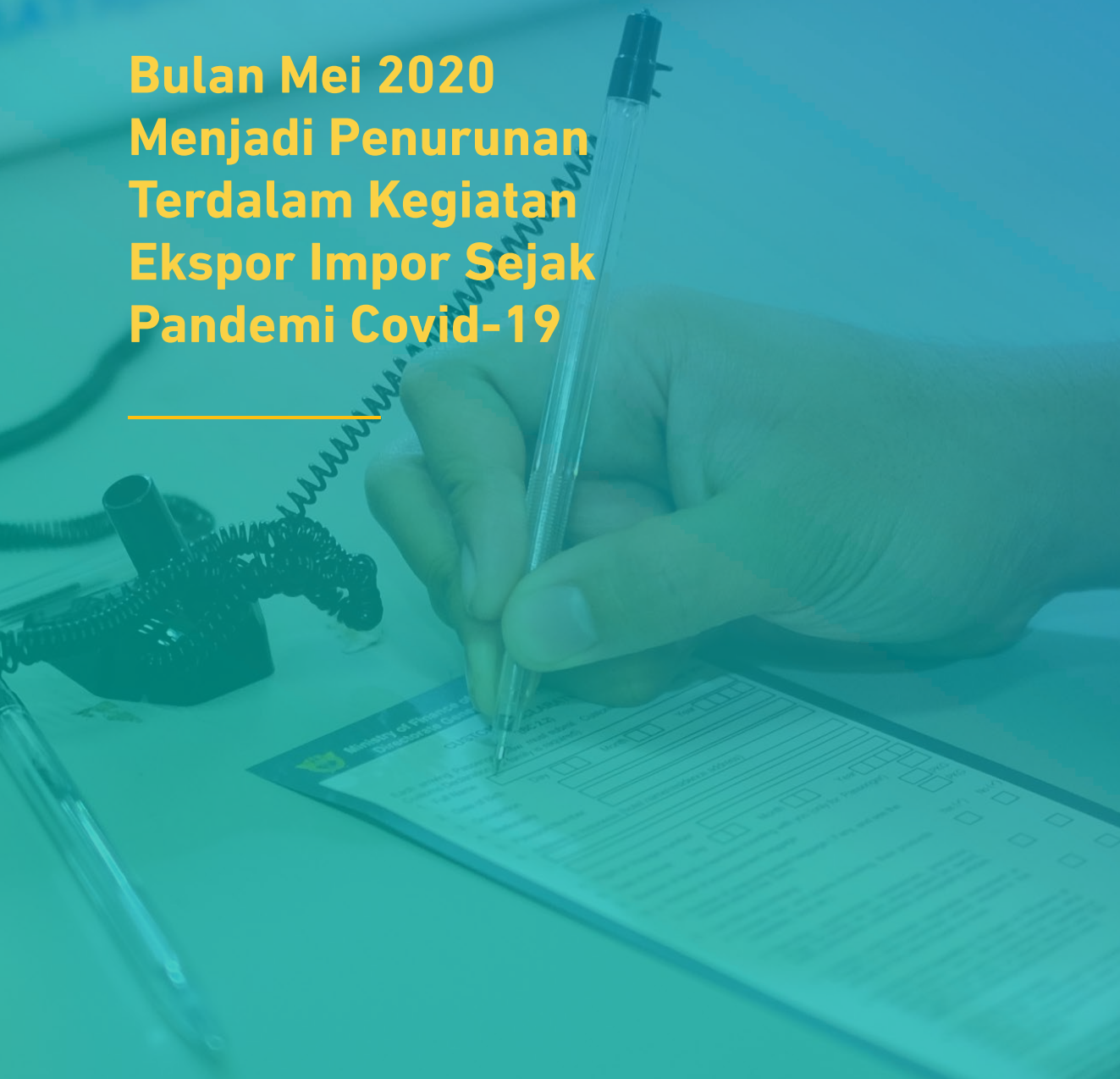
New Normal Pelayanan Perpajakan

Sementara itu di sisi administrasi perpajakan, Direktorat Jenderal

Pajak (DJP), dalam menyikapi perkembangan terkini penyebaran Covid-19 serta sebagai bagian dari strategi *new normal* Pemerintah, berencana untuk membuka kembali pelayanan perpajakan melalui tatap muka mulai tanggal 15 Juni 2020. Terdapat beberapa layanan yang masih dikecualikan, yaitu pendaftaran NPWP, pelaporan SPT yang sudah wajib *e-filing*, Surat Keterangan Fiskal (SKF), Validasi SSP PPhTB, aktivasi/lupa EFIN, serta layanan VAT *Refund* di bandara.

Pelayanan dilaksanakan dengan tetap mengedepankan protokol kesehatan dalam pencegahan penularan Covid-19. Petugas akan mengenakan masker, *face shield* dan/atau sarung tangan sesuai kebutuhan dan risiko, serta memberi salam tanpa berjabat tangan. Bagi Wajib Pajak, kantor unit kerja akan menerapkan protokol pengukuran suhu tubuh sebelum memperbolehkan Wajib Pajak masuk ke dalam area kantor, sesuai situasi dan kondisi. Sebelum berkonsultasi Wajib Pajak juga diharapkan dapat membuat janji terlebih dulu, selalu mengenakan masker, serta selalu menerapkan jaga jarak fisik di area kantor. Daftar kontak unit kerja DJP dapat dilihat melalui laman www.pajak.go.id/unit-kerja.

Bulan Mei 2020 Menjadi Penurunan Terdalam Kegiatan Ekspor Impor Sejak Pandemi Covid-19



Kepabeanaan dan Cukai

Neraca perdagangan Indonesia bulan Mei 2020 yang tercatat surplus USD2,09 Miliar tidak serta merta menjadi indikator membaiknya aktivitas perekonomian Indonesia. Hal itu dikarenakan bila di-breakdown lebih dalam, terdapat penurunan impor dan ekspor barang non migas yang dalam hingga 33 persen dan 18 persen dibandingkan bulan April 2020.

Penurunan yang dalam pada kegiatan ekspor dan impor bulan ini, berdampak lanjutan terhadap kegiatan ekonomi dalam negeri dan penerimaan negara dalam rangka impor dan ekspor. Selain penurunan kegiatan ekspor impor, relaksasi pembayaran bea masuk dan pajak lainnya dalam rangka impor turut memberi pengaruh pada penerimaan.

Realisasi penerimaan Kepabeanaan dan Cukai hingga bulan Mei 2020 mencapai Rp81,51 triliun atau 39,63 persen dari target pada PP54. Capaian tersebut didorong

oleh kinerja penerimaan cukai yang tumbuh sebesar 18,54 persen (*yoy*).

Realisasi penerimaan Kepabeanaan dan Cukai hingga bulan Mei 2020 mencapai Rp81,51 triliun atau 39,09 persen dari target pada PP54. Capaian tersebut didorong oleh kinerja penerimaan cukai yang tumbuh sebesar 18,54 persen (*yoy*).

Realisasi atas penerimaan pajak dalam rangka impor (PDRI) lainnya, yang pemungutannya dilakukan oleh DJBC per 31 Mei 2020 adalah Rp80,09 triliun atau tumbuh melambat 4,56 persen bila dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2019.

Berdasarkan komponen penerimaan kepabeanaan dan cukai, yang terdiri dari Bea Masuk (BM), Bea Keluar (BK) dan Cukai, pada awal tahun 2020 masih dipengaruhi oleh kondisi eksternal dan internal. Faktor eksternal dimaksud antara lain, terus melemahnya permintaan global,

Realisasi penerimaan Kepabeanaan dan cukai

No.	Jenis Penerimaan	Target Perpres 54/2020	Realisasi		Growth (y-o-y, %)		% Capaian
			2019	2020	2019	2020	
1	BEA MASUK	33.88	14.97	13.79	-3.32	-7.86	40.72
2	CUKAI	172.90	56.21	66.63	58.27	18.54	38.54
	Hasil Tembakau	165.65	53.66	64.65	60.17	20.46	39.03
	Ethil Alkohol	0.15	0.05	0.17	-12.20	226.99	107.62
	MMEA	7.10	2.46	1.79	27.79	-27.32	25.19
	Denda Adm. Cukai	-	0.02	0.02	19.68	-7.36	-
	Cukai Lainnya	-	0.01	0.01	54.33	-27.83	-
	Plastik	-	0.00	0.00	0.00	0.00	-
3	BEA KELUAR	1.75	1.50	1.09	-46.28	-27.45	62.13
	TOTAL	208.52	72.68	81.51	35.12	12.15	39.09
	PPN Impor		71.14	60.61	-2.71	-14.80	
	PPn BM Impor		1.65	1.58	-10.97	-4.18	
	PPh Pasal 22 Impor		23.86	17.90	0.62	-24.97	
	Total PDRI lainnya		96.65	80.09	-2.07	-17.13	
	TOTAL DJBC + PERPAJAKAN		169.32	161.60	11.05	-4.56	

hingga meluasnya efek pandemi virus corona. Faktor internal, seperti kebijakan pembatasan ekspor Nikel yang diterapkan sejak akhir tahun 2019 berdampak pada penurunan penerimaan BK, masih melambatnya PMI manufaktur domestik maupun global, serta penyesuaian tarif cukai yang memengaruhi penerimaan cukai.

Penerimaan BM hingga akhir Mei 2020 adalah Rp13,79 triliun atau 40,72 persen dari target pada PP54 (melambat 7,86 persen *yoy*). Kinerja penerimaan BM masih mengalami tekanan sejak awal tahun, hal ini terlihat dari aktivitas impor barang yang melambat cukup tajam sebesar 41,64 persen *yoy*. Dengan demikian, penerimaan BM pun mengalami pertumbuhan negatif sebesar 7,86 persen *yoy*.

Penerimaan cukai per 31 Mei 2020 adalah sebesar Rp66,63 triliun atau 38,54 persen dari targetnya. Penerimaan cukai yang terdiri atas cukai Hasil Tembakau (HT), Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA), dan Etil Alkohol (EA), tumbuh sebesar 18,54 persen dibandingkan bulan Mei tahun 2019. Pertumbuhan pada penerimaan cukai tersebut merupakan pertumbuhan tertinggi dibandingkan komponen penerimaan yang lain (BK dan BM). Faktor kebijakan relaksasi pelunasan pemesanan pita cukai

(CK-1). Dilihat dari level pertumbuhan kumulatifnya, pertumbuhan cukai atas EA menjadi yang tertinggi dengan pertumbuhan sebesar 226,99 persen.

Penerimaan cukai HT mempunyai porsi terbesar dalam penerimaan cukai, yang hingga 31 Mei 2020 terkumpul Rp64,65 triliun atau tumbuh 20,46 persen. Pertumbuhan signifikan cukai HT di tengah perlambatan komponen penerimaan yang lain, disebabkan pergeseran penerimaan tahun 2019 (PMK 57).

Penerimaan cukai MMEA sepanjang awal tahun ini adalah Rp1,79 triliun atau melambat 27,32 persen dibandingkan periode yang sama tahun 2019. Perlambatan pertumbuhan produksi MMEA dalam negeri disebabkan penurunan total produksi bulan April serta Ramadhan, sehingga menekan konsumsi MMEA dalam negeri.

Penerimaan BK masih mengalami perlambatan, bahkan lebih dalam dibandingkan penerimaan kepabeanan dan cukai lainnya dengan pertumbuhan negatif 27,45 persen dibandingkan tahun lalu atau hanya terkumpul sebesar Rp1,09 triliun. Pelarangan ekspor komoditas pertambangan nikel yang merupakan kontributor terbesar BK pada tahun 2019, serta masih belum optimalnya ekspor tembaga, menjadi penyebab utama perlambatan penerimaan BK

Kinerja positif penerimaan dari sektor Perikanan dan Panas Bumi menyumbang PNBPNBP



Penerimaan Negara Bukan Pajak

Realisasi PNBP sampai dengan tanggal 31 Mei 2020 mencapai Rp136,89 triliun atau mengalami penurunan sebesar 13,61 persen dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2019 yang mencapai sebesar Rp158,46 triliun. Penurunan realisasi PNBP ini, antara lain dipengaruhi oleh pandemic Covid-19 yang selain memberikan dampak pada penurunan kondisi perekonomian global, juga berimbas pada perekonomian nasional. Meskipun pada beberapa jenis PNBP mengalami pertumbuhan, namun secara umum capaian kinerja PNBP mengalami penurunan akibat tekanan yang cukup berat pada kinerja PNBP periode ini.

Pada penerimaan Sumber Daya Alam (SDA), realisasi sampai dengan akhir bulan Mei 2020 mencapai Rp49,26 triliun atau

mengalami penurunan sebesar 24,38 persen dibandingkan dengan realisasi pada periode yang sama tahun 2019. Penurunan penerimaan SDA tersebut, sebagai akibat dari Penerimaan SDA Migas yang terealisasi sebesar Rp38,86 triliun atau mengalami penurunan dari periode yang sama pada tahun sebelumnya sebesar 24,38 persen (*yoy*) serta penurunan realisasi Penerimaan SDA Non Migas yang mencapai 23,69 persen dengan realisasi sebesar Rp10,39 triliun.

Realisasi penerimaan SDA Migas yang mengalami pertumbuhan sebesar negatif 24,38 persen (*yoy*) dibandingkan periode yang sama tahun 2019 yang tumbuh sebesar 1,54 persen disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain: 1) penurunan rata-rata ICP periode Desember 2019 s.d. April 2020 sebesar US\$48,81/barel

RealisasiPenerimaan Negara Bukan Pajak

PNBP (miliar Rupiah)		2020			
		Perpres No. 54 Tahun 2020	Real s.d 31 Mei	% thd Perpres	yoy
Penerimaan Negara Bukan Pajak		297.755,5	136.890,4	45,97	(13,61)
A	Penerimaan SDA	82.225,9	49.257,4	59,90	(24,23)
1	Migas	53.294,9	38.860,1	72,92	(24,38)
2	Non Migas	28.931,0	10.397,4	35,94	(23,69)
a	Pertambangan Minerba	22.134,1	8.558,1	38,66	(25,67)
b	Kehutanan	4.417,6	1.356,3	30,70	(19,70)
c	Perikanan	900,4	250,9	27,87	9,38
d	Pend. Pert. Panas Bumi	1.479,0	232,1	15,69	19,84
B	Pendapatan dari Kekayaan Negara Dipisahkan	65.000,0	24.017,7	36,95	(26,79)
C	PNBP Lainnya	94.738,8	44.100,5	46,55	4,30
D	Pendapatan BLU	55.790,8	19.514,8	34,98	6,29

dibandingkan periode yang sama tahun 2019 (US\$60,92/barel); 2) penurunan rata-rata *lifting* minyak bumi periode Desember 2019 s.d. April 2020 sebesar 728,00 MBOPD dibandingkan periode yang sama tahun 2019 (768,89 MBOPD); serta 3) penurunan rata-rata *lifting* gas bumi periode Desember 2019 s.d. April 2020 sebesar 1.048,36 MBOEPD dibandingkan periode yang sama tahun 2019 (1.145,00 MBOEPD).

Selanjutnya, realisasi Penerimaan SDA Non Migas hingga bulan Mei 2020 mencapai Rp10,39 triliun. Realisasi PNBPN SDA Nonmigas tersebut menurun sebesar 23,69 persen (*yoy*) apabila dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2019 sebesar Rp13,63 triliun. Penurunan PNBPN SDA Non Migas ini disebabkan adanya penurunan pertumbuhan sektor Pertambangan Minerba dan Kehutanan.

Pada sektor Pertambangan Minerba realisasi hingga bulan Mei 2020 sebesar Rp8,56 triliun atau mengalami penurunan sebesar 25,67 persen dibandingkan periode yang sama tahun 2019 yang tumbuh sebesar negatif 6,15 persen. Penurunan ini disebabkan oleh penurunan rata-rata Harga Batubara Acuan (HBA) periode Januari s.d. Mei 2020 sebesar US\$65,36/ton

dibandingkan periode yang sama tahun 2019 (US\$89,10/ton). Selain itu, penurunan volume produksi batubara periode Januari s.d. Mei 2020 sebesar 250,3 juta ton dibandingkan periode yang sama tahun 2019 (226,66 juta ton) juga berkontribusi pada penurunan penerimaan dari sektor Pertambangan Minerba.

Adapun sektor Kehutanan juga turut memberikan kontribusi atas penurunan penerimaan SDA Non Migas. Realisasi sektor Kehutanan hingga bulan Mei 2020 menghasilkan penerimaan sebesar Rp1,36 triliun (atau tumbuh sebesar negatif 19,70 persen dibandingkan periode yang sama tahun 2019 yang tumbuh sebesar 6,26 persen). Penurunan ini disebabkan adanya penurunan volume produksi kayu dari 2.771.236 m³ di tahun 2019 menjadi 2.073.013 m³ pada tahun 2020.

Di sisi lain, penerimaan sektor Perikanan dan Pendapatan Panas Bumi menunjukkan kinerja yang positif pada bulan Mei 2020 ini. Realisasi penerimaan sektor Perikanan hingga bulan Mei 2020 sebesar Rp250,92 miliar atau mengalami pertumbuhan sebesar 9,38 persen dibandingkan periode yang sama tahun 2019 yang tumbuh sebesar 2,02 persen (*yoy*). Pertumbuhan ini

dikarenakan adanya percepatan proses pengajuan perijinan perikanan tangkap dari semula 14 hari menjadi 1 jam sehingga menambah jumlah kapal yang mengajukan perijinan.

Selanjutnya, sektor pendapatan Panas Bumi juga menunjukkan peningkatan kinerja positif. Pada tahun 2020 ini terdapat kenaikan sebesar 19,84 persen dari tahun sebelumnya sebesar negatif 11,16 persen (*yoy*). Realisasi penerimaan sektor pendapatan Panas Bumi hingga bulan Mei 2020 sebesar Rp232,10 miliar. Pertumbuhan ini utamanya berasal dari pendapatan perusahaan panas bumi di bulan Maret 2020 sebesar Rp191,28 miliar. Pendapatan perusahaan panas bumi ini diperoleh dari setoran bagian Pemerintah setelah dikurangi dengan kewajiban kontraktual, dimana pada periode tersebut setoran bagian Pemerintah lebih besar daripada periode sebelumnya sehingga menghasilkan pendapatan perusahaan panas bumi yang lebih besar. Selain itu, PNBP sektor panas bumi yang berasal dari iuran produksi/royalti panas bumi juga mengalami peningkatan. Hal ini dikarenakan adanya setoran dari PLTP Sorik Marapi yang telah beroperasi komersial/COD sejak bulan Oktober 2019 dan PLTP Muaralaboh yang telah beroperasi komersial/COD sejak bulan Desember 2019.

Sementara itu, penerimaan dari pendapatan Kekayaan Negara Dipisahkan (KND) pada bulan Mei 2020 menunjukkan pertumbuhan sebesar negatif 26,79 persen atau mengalami penurunan dibandingkan periode yang sama tahun 2019 yang realisasinya mencapai Rp32,81 triliun. Hal ini disebabkan pada tahun 2019 terdapat setoran pendapatan KND dari sisa Surplus BI sebesar Rp30,0 triliun yang disetorkan pada bulan Mei 2019. Sedangkan pada tahun 2020, pendapatan KND dari setoran sisa Surplus BI rencananya baru akan disetor pada pertengahan bulan Juni 2020. Hal lain yang menyebabkan penurunan pendapatan KND pada periode ini adalah adanya penundaan pelaksanaan RUPS sebagian besar BUMN yang baru akan dimulai bulan Juni 2020 (kecuali BUMN Perbankan Himbara yang menyelenggarakan RUPS lebih cepat dibandingkan tahun sebelumnya).

Realisasi penerimaan dari PNBP Lainnya hingga bulan Mei 2020 mencapai sebesar Rp44,10 triliun atau mengalami pertumbuhan 4,30 persen dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya. Kenaikan realisasi ini antara lain disebabkan adanya penerimaan PNBP dari Akumulasi Iuran Pensiun (AIP) pada bulan Mei 2020 dengan jumlah yang cukup signifikan yaitu sebesar

Rp7,90 triliun. Namun, secara umum memperlihatkan masih terjadi penurunan realisasi PNPB lainnya terutama pada beberapa Kementerian/Lembaga yang memberikan pelayanan secara langsung kepada masyarakat, terimbas dampak dari penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) sebagai tindak lanjut penanganan Covid-19.

Pendapatan Badan Layanan Umum (BLU) pada bulan Mei 2020 menunjukkan adanya

peningkatan kinerja. Pendapatan dari BLU mengalami pertumbuhan sebesar 6,29 persen dengan realisasi sebesar Rp19,51 triliun dibandingkan periode yang sama tahun 2019 sebesar Rp18,36 triliun. Kenaikan kinerja ini disumbang dari pendapatan dana perkebunan kelapa sawit, peningkatan jasa layanan kesehatan pada rumah sakit, dan pendapatan pengelolaan dana pengembangan pendidikan nasional.

**Ditopang oleh kinerja
bantuan sosial untuk
menangani dampak
pandemi Covid-19**

Belanja Pemerintah Pusat

Realisasi Belanja Pemerintah Pusat (BPP) sampai dengan Mei 2020 mencapai Rp537,33 triliun, lebih tinggi 1,23 persen dibandingkan realisasi BPP pada periode yang sama tahun 2019. Meskipun terdapat berbagai belanja yang tertunda pelaksanaannya, belanja pemerintah pusat masih dapat tumbuh karena ditopang oleh penyaluran belanja untuk penanganan Covid-19, utamanya terkait jaring pengaman sosial.

Belanja K/L

Realisasi Belanja K/L hingga Mei 2020 mencapai Rp270,57 triliun, turun 6,13 persen (*yoy*) dibandingkan realisasinya pada periode yang sama tahun 2019, yang dipengaruhi oleh rendahnya realisasi untuk belanja pegawai, belanja barang, dan belanja modal.

Realisasi Belanja Pegawai sampai dengan Mei 2020 mencapai Rp95,41 triliun, turun sebesar 4,22 persen (*yoy*). Penurunan ini disebabkan kebijakan pemberian THR tahun 2020, yaitu: (a) Pejabat Negara, Pejabat Eselon 1 dan 2, dan pejabat lainnya sebagaimana tercantum dalam PP Nomor 24 Tahun 2020 tidak menerima THR; dan (b) ASN diluar butir a tidak dibayarkan komponen tunjangan kinerjanya, hanya gaji dan tunjangan melekat.

Realisasi Belanja Barang sampai dengan Mei 2020 mencapai Rp69,36 triliun, turun sebesar 30,11 persen (*yoy*). Hal ini dipengaruhi oleh menurunnya penyerapan belanja barang pada K/L, terutama pada belanja operasional/non operasional, belanja perjalanan, dan belanja barang diserahkan kepada masyarakat/Pemda sebagai

Realisasi Belanja Pemerintah Pusat s.d. Mei 2020 (Triliun Rupiah)

Belanja Pemerintah Pusat	Perubahan APBN 2020 (Perpres 54/2020)	Realisasi s.d. 31 Mei 2020	% thd Perubahan APBN	% Growth (yoy)
Belanja K/L	836,54	270,57	32,34	(6,13)
Belanja Pegawai	260,08	95,41	36,69	(4,22)
Belanja Barang	284,48	69,36	24,38	(30,11)
Belanja Modal	166,91	26,94	16,14	(7,31)
Bantuan Sosial	125,06	78,85	63,05	30,71
Belanja Non-K/L	1.014,57	266,76	26,29	9,97
a.l. Pembayaran Bunga Utang	335,16	145,71	43,47	14,66
Subsidi	157,29	48,89	31,09	(3,36)
Total Belanja Pemerintah Pusat	1.851,10	537,33	29,03	1,23

dampak penerapan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dalam rangka penanganan Covid-19.

Belanja Modal sampai dengan Mei 2020 mencapai Rp26,94 triliun, turun sebesar 7,31 persen (*yoy*). Perlambatan pada kinerja belanja modal dipengaruhi oleh penundaan atau penghematan belanja modal dalam rangka penanganan Covid-19.

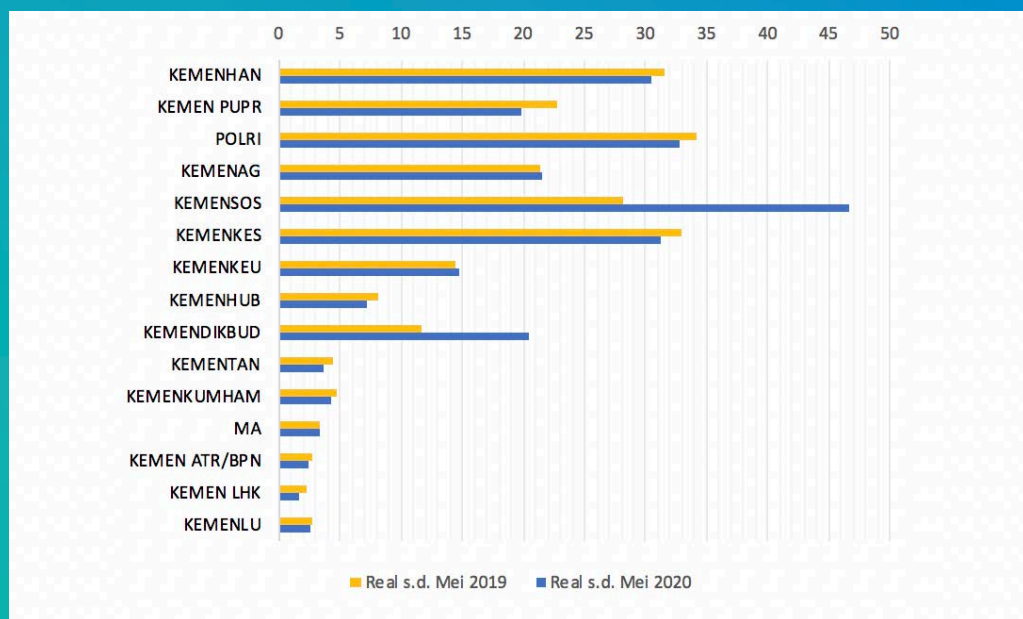
Perlambatan realisasi belanja modal terutama terjadi di belanja jalan, irigasi, dan jaringan yang dilaksanakan oleh Kementerian PUPR dan Kementerian Perhubungan. Meskipun demikian, realisasi belanja modal tanah serta peralatan dan mesin mencatat adanya kenaikan realisasi dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Sebaliknya, realisasi Bantuan Sosial mencatat pertumbuhan sebesar 30,71 persen (*yoy*), dengan realisasi mencapai Rp78,85 triliun. Peningkatan realisasi bantuan sosial terutama dipengaruhi oleh kebijakan penyaluran bantuan sosial kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh Kementerian Sosial dalam rangka penanganan dampak pandemi Covid-19, melalui penyaluran: (a) bantuan program Kartu Sembako dengan perluasan cakupan

penerimanya dan kenaikan indeks manfaat dibandingkan tahun sebelumnya; dan (b) bantuan sosial tunai untuk keluarga di luar Jabodetabek yang merupakan program baru untuk penanganan dampak Covid-19. Selain itu, terdapat kenaikan realisasi bantuan Program Indonesia Pintar (PIP) dibandingkan tahun sebelumnya yang dilaksanakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Realisasi belanja K/L pada periode sampai dengan Mei 2020 secara umum didorong oleh K/L yang berfokus pada penanganan dampak pandemi Covid-19 terutama di bidang perlindungan sosial, yang disalurkan oleh Kementerian Sosial. Hal ini juga terlihat dari nilai *outstanding* kontrak belanja K/L, dimana pada 10 K/L dengan nilai kontrak terbesar hanya Kementerian Sosial yang mengalami peningkatan *outstanding* kontrak belanja. Selain bidang perlindungan sosial, K/L yang memiliki tuisi di bidang pendidikan juga relatif mengalami peningkatan realisasi belanja, yaitu Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Kementerian Agama. Sementara itu, realisasi K/L lainnya secara umum tumbuh negatif sebagai dampak perlambatan pelaksanaan kegiatan akibat pandemi Covid-19.

Realisasi Belanja K/L s.d. Mei pada 15 K/L dengan Pagu Terbesar, TA 2019-2020 (Triliun Rupiah)



Capaian output strategis K/L di bidang perlindungan sosial sampai dengan Mei 2020 juga sudah mendekati target output, antara lain penyaluran bantuan sosial PBI-JKN kepada 96,6 juta jiwa, Program Keluarga Harapan (PKH) kepada 10,0 juta KPM, dan Bantuan Pangan (Kartu Sembako) kepada 18,32 juta KPM. Meskipun terjadi perlambatan pelaksanaan kegiatan, capaian output strategis K/L di bidang infrastruktur dan bidang sumber daya manusia masih relatif *on track* terhadap target outputnya. Capaian output strategis di bidang infrastruktur, antara lain pembangunan jalan baru sepanjang 31,27 km, jembatan sepanjang 1.216,8 m, dan rel kereta api sepanjang 56,4 km'sp. Pada bidang pendidikan, capaian output strategisnya antara lain penyaluran bantuan pendidikan Program Indonesia Pintar (PIP) untuk 12,05 juta siswa, Bidik Misi/KIP Kuliah kepada 367.383 mahasiswa, dan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) bagi 4,7 juta siswa.

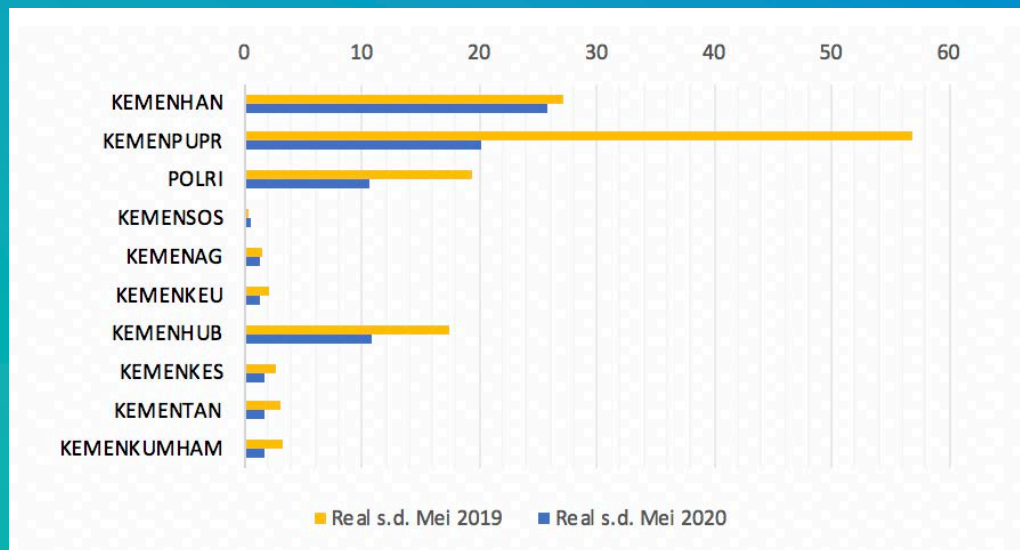
Belanja Non-K/L

Realisasi Belanja Non-K/L hingga Mei 2020 mencapai Rp266,76 triliun, tumbuh 9,97 persen (*yoy*) dibandingkan realisasinya pada periode yang sama tahun 2019, yang digunakan untuk pembayaran bunga utang, subsidi, dan belanja

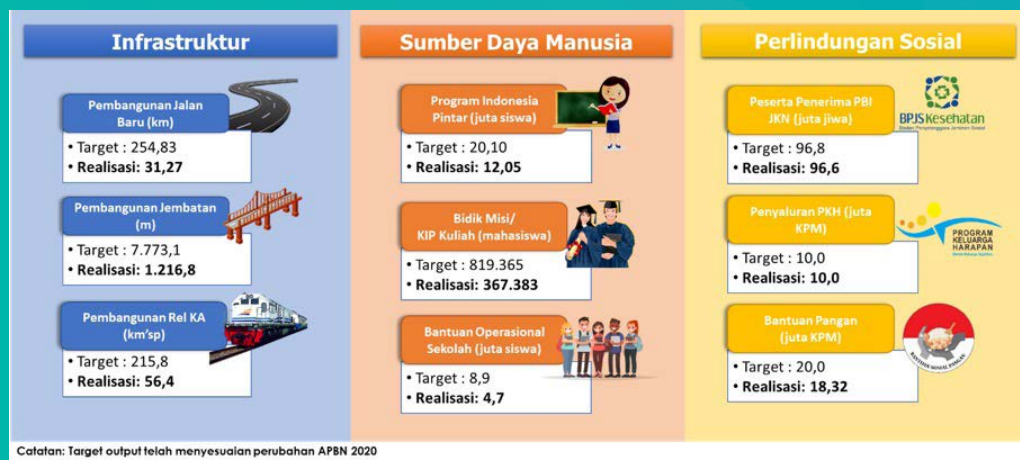
lain-lain. Realisasi Pembayaran Bunga Utang sampai dengan Mei 2020 sebesar Rp145,71 triliun, naik 14,66 persen (*yoy*), sejalan dengan tambahan penerbitan utang yang dilakukan untuk menutup peningkatan defisit APBN 2020 dan peningkatan pengeluaran pembiayaan.

Sementara itu, realisasi Subsidi sampai dengan Mei 2020 turun sebesar 3,36 persen (*yoy*), dengan realisasi mencapai Rp48,89 triliun. Realisasi subsidi tersebut digunakan untuk: (a) subsidi energi sebesar Rp36,43 triliun, mencakup subsidi BBM dan LPG serta subsidi listrik; dan (b) subsidi non energi sebesar Rp12,46 triliun, antara lain untuk subsidi pupuk dan subsidi bunga kredit program. Selain dipengaruhi oleh ICP, CP Aramco, dan Kurs, realisasi subsidi juga dipengaruhi oleh proses administrasi dan verifikasi dalam proses penagihan pembayaran subsidi. Dari kinerja penyaluran sampai dengan April 2020, penyaluran BBM mencapai 4,9 juta KL, LPG 3 kg mencapai 2.309,2 juta kg, dan listrik bersubsidi mencapai 19,46 TWh. Di samping itu, dalam rangka penanganan dampak pandemi Covid-19, pemerintah juga memberikan program stimulus melalui belanja subsidi, yaitu diskon tarif listrik bagi pelanggan rumah tangga daya 450 VA dan 900 VA subsidi,

Outstanding Kontrak Belanja K/L s.d. Mei pada 10 K/L dengan Nilai Kontrak Terbesar, TA 2019-2020 (Triliun Rupiah)



Capaian Output Strategis K/L s.d. Mei 2020



subsidi bunga kepada UMKM, dan stimulus perumahan kepada masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Dari berbagai program stimulus melalui subsidi tersebut, yang sudah berjalan sampai dengan Mei 2020 adalah diskon tarif listrik, sedangkan untuk subsidi UMKM dan program stimulus perumahan masih dalam proses administrasi. Jumlah pelanggan golongan tarif rumah tangga yang telah menerima pembebasan/diskon tarif adalah sebesar 30,7 juta pelanggan pada April 2020 dan 30,8 juta pelanggan pada Mei 2020.

Realisasi belanja lain-lain sampai dengan Mei 2020 mencapai Rp3,39 triliun. Realisasi tersebut utamanya digunakan untuk pelaksanaan program Kartu Pra Kerja yang juga merupakan salah satu program bantuan pemerintah dalam penanganan Covid-19 yang diperuntukkan bagi pekerja formal/informal dan pelaku usaha mikro yang terdampak dari berkurangnya aktivitas ekonomi akibat pandemi Covid-19. Sampai dengan Mei 2020, realisasi anggaran untuk program Kartu Pra Kerja sebesar Rp2,42 triliun dengan jumlah peserta sebanyak 680.921 orang.

Dukung Ketahanan Ekonomi Desa di Tengah Pandemi Covid-19, Penyaluran Dana Desa Kian Meningkat



Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa

Sampai dengan 31 Mei 2020, Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) telah disalurkan sebesar Rp306,60 triliun atau 40,20 persen dari pagu alokasi. Jumlah ini menunjukkan terdapat pertumbuhan negatif sebesar 5,69 persen (yoy).

A. Dana Perimbangan

Penyaluran Dana Bagi Hasil (DBH) per akhir Mei 2020 telah terealisasi sebesar Rp31,46 triliun atau 35,02 persen dari pagu alokasi, yang terdiri dari penyaluran DBH TA 2020 sebesar Rp20,32 triliun dan penyaluran KB DBH sebesar Rp11,14 triliun. Penyaluran DBH dimaksud mengalami penurunan sebesar 5,22 persen (yoy). Hal tersebut selain akibat adanya kebijakan penyesuaian alokasi DBH regular TA 2020 dalam Peraturan Presiden nomor 78

Tahun 2019 tentang Rincian APBN TA 2020, juga dikarenakan pada bulan April terdapat perubahan alokasi DBH dari semula Rp117,58 triliun menjadi sebesar Rp89,81 triliun, sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian APBN TA 2020.

Realisasi penyaluran Dana Alokasi Umum (DAU) hingga 31 Mei 2020 adalah sebesar Rp190,87 triliun atau 49,66 persen dari pagu alokasi, yang terdiri dari DAU Formula sebesar 189,97 triliun dan DAU Tambahan sebesar Rp894,02 miliar. Angka tersebut mengalami penurunan sebesar 8,63 persen (yoy). Penurunan capaian ini disebabkan oleh penyaluran DAU TA 2020 telah berbasis kinerja dimana penyaluran DAU dilakukan oleh Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan dengan memperhatikan

REALISASI TKDD TAHUN ANGGARAN 2019 DAN 2020
Tanggal: 1 – 31 Mei 2020 (dalam miliar rupiah)

Uraian	2019		2020		
	Alokasi	Realisasi	Alokasi	Realisasi	% thd APBN
Transfer ke Daerah dan Dana Desa	826.772,53	325.095,36	762.718,87	306.604,74	40,20
Transfer ke Daerah	756.772,53	304.662,60	691.528,87	277.734,26	40,16
A. Dana Perimbangan	724.592,59	297.342,91	657.152,14	274.321,85	41,74
1. Dana Transfer Umum	524.223,75	242.073,06	474.193,45	222.321,69	46,88
a. Dana Bagi Hasil	106.350,16	33.189,19	89.811,92	31.455,98	35,02
b. Dana Alokasi Umum	417.873,58	208.883,88	384.381,52	190.865,71	49,66
2. Dana Transfer Khusus	200.368,84	55.269,84	182.958,70	52.000,16	28,42
a. Dana Alokasi Khusus Fisik	69.326,70	2.328,14	54.187,35	2.871,67	5,30
b. Dana Alokasi Khusus Non Fisik	131.042,14	52.941,70	128.771,35	49.128,49	38,15
B. Dana Insentif Daerah	10.000,00	5.175,36	13.500,00	3.214,41	23,81
C. Dana Otsus dan Dana Keistimewaan DIY	22.179,94	2.144,34	20.876,73	198,00	0,95
1. Dana Otsus	20.979,94	1.184,34	19.556,73	-	-
a. Provinsi Papua dan Papua Barat	8.357,47	752,17	7.555,28	-	-
b. Provinsi Aceh	8.357,47	-	7.555,28	-	-
c. Dana Tambahan Infrastruktur	4.265,00	432,17	4.446,17	-	-
2. Dana Keistimewaan D.I.Y	1.200,00	960,00	1.320,00	198,00	15,00
Dana Desa	70.000,00	20.432,75*	71.190,00	28.870,49	40,55

(*) Dana Desa tahun 2019 masih disalurkan melalui Rekening Kas Umum Daerah (RKUD)

laporan Belanja Pegawai dan khusus DAU bulan April ditambah laporan Belanja Infrastruktur Daerah, laporan Pemenuhan Indikator Layanan Pendidikan, dan laporan Pemenuhan Indikator Layanan Kesehatan dari Pemerintah Daerah sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomor 139/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusus.

Kemudian, dengan diterbitkannya PMK Nomor 19/PMK.07/2020 tentang Penyaluran dan Penggunaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Insentif Daerah TA 2020 dalam rangka Penanggulangan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* dan PMK Nomor 35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 Dalam Rangka Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* dan/ atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional, maka penyaluran DAU bulan Mei sampai dengan September juga memperhatikan syarat tambahan yaitu laporan penyesuaian APBD Tahun 2020 dan laporan kinerja bidang Kesehatan serta laporan bantuan sosial kepada masyarakat dalam rangka pencegahan dan/atau penanganan *Covid-19*.

Realisasi DAU Formula per 31 Mei 2020 di atas turut dipengaruhi oleh : (i) penundaan penyaluran DAU bulan Juni terhadap 66 daerah dari 98 daerah yang masih mendapat sanksi sampai dengan akhir bulan Mei karena tidak menyampaikan Laporan Penyesuaian APBD dengan benar dan lengkap sesuai PMK Nomor 35/PMK.07/2020 dan (ii) penyaluran kembali DAU bulan Februari dan April masing-masing kepada satu daerah karena telah menyampaikan laporan Informasi Keuangan Daerah serta penyaluran Kembali DAU bulan Mei kepada 280 daerah yang telah menyampaikan Laporan Penyesuaian APBD dengan benar dan lengkap. Sementara itu, realisasi DAU Tambahan terdiri atas DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan Tahap I sebesar Rp750,42 miliar yang telah disalurkan kepada 190 daerah dan DAU Tambahan Bantuan Penyetaraan Siltap Kepala Desa dan Perangkat Desa Tahap I sebesar Rp143,60 miliar yang telah disalurkan kepada 17 daerah penerima alokasi.

Hingga 31 Mei 2020, penyaluran Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik telah terealisasi sebesar Rp2,87 triliun atau 5,30 persen dari pagu alokasi, menunjukkan kenaikan sebesar 23,35 persen (*yoy*). Perbaikan tersebut disebabkan oleh adanya percepatan

penyelesaian Rencana Kegiatan (RK) yang pada tahun sebelumnya paling lambat di minggu pertama Februari menjadi minggu pertama bulan Januari. Percepatan penyelesaian RK ini sekaligus mempercepat proses pengadaan barang dan jasa di daerah (kontrak), yang merupakan salah satu syarat penyaluran. Selain itu, penyampaian kontrak kegiatan DAK Fisik dalam aplikasi OMSPAN juga mengalami percepatan sesuai dengan arahan Surat Menteri Keuangan tentang Penghentian Barang/Jasa DAK Fisik TA 2020. Percepatan penyaluran DAK Fisik juga dikarenakan adanya penyaluran DAK Fisik Bidang Kesehatan terkait kegiatan pencegahan dan/atau penanganan Covid-19 yang disalurkan secara sekaligus dengan syarat revisi RK untuk kegiatan pencegahan dan/atau penanganan Covid-19 yang telah disetujui oleh Kementerian Kesehatan.

DAK Nonfisik hingga akhir Mei 2020 telah disalurkan sebesar Rp49,13 triliun atau 38,15 persen dari pagu alokasi. Angka ini menunjukkan penurunan sebesar 7,20 persen (*yoy*). Hal tersebut utamanya disebabkan oleh perubahan penyaluran Dana BOS yang semula ke provinsi menjadi ke sekolah sehingga membutuhkan proses validasi rekening sekolah baik pada tahap

I maupun tahap II, dan perubahan pola penyaluran Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan yang pada tahun 2019 dilakukan sekaligus menjadi disalurkan dalam dua tahap di tahun 2020. Hal lain yang berkontribusi pada penurunan realisasi penyaluran adalah cukup rendahnya tingkat pelaporan daerah atas realisasi beberapa jenis DAK Nonfisik yang baru dialokasikan pada tahun 2019. Selain itu juga terdapat keterlambatan penerbitan Petunjuk Teknis Dana Pelayanan Kepariwisata yang baru terbit akhir Mei sehingga penyaluran dananya baru dapat dilaksanakan pada awal Juni.

B. Dana Insentif Daerah (DID)

Realisasi penyaluran DID per 31 Mei 2020 adalah sebesar Rp3,21 triliun atau 23,81 persen dari pagu alokasi, menurun dibanding realisasinya pada periode yang sama tahun sebelumnya. Hal tersebut disebabkan banyak daerah yang belum menyampaikan persyaratan penyaluran DID tahap I pada aplikasi SIKD secara lengkap dan benar.

Dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.07/2019 diatur bahwa persyaratan penyaluran DID tahap I yang harus disampaikan oleh Pemerintah Daerah adalah: (i) Peraturan Daerah mengenai

APBD Tahun Anggaran 2020; (ii) Rencana penggunaan DID tahun anggaran berjalan; dan (iii) Laporan realisasi penyerapan DID Tahun Anggaran sebelumnya bagi daerah yang menerima. Rencana penggunaan DID tahun anggaran berjalan dan laporan penyerapan DID tahun anggaran sebelumnya disampaikan melalui aplikasi SIKD.

C. Dana Otonomi Khusus dan Dana Keistimewaan D.I. Yogyakarta

Sampai dengan 31 Mei 2020, penyaluran Dana Otonomi Khusus dan Dana Keistimewaan D.I. Yogyakarta telah terealisasi sebesar Rp0,20 triliun atau 0,95 persen dari pagu alokasi. Angka tersebut mengalami penurunan jika dibandingkan dengan realisasinya pada periode yang sama tahun sebelumnya.

Belum adanya penyaluran Dana Otsus dan Dana Tambahan Infrastruktur (DTI) disebabkan masih terdapat ketidaksesuaian dari dokumen syarat penyaluran yang telah disampaikan, yaitu adanya perbedaan nilai realisasi penyerapan tahun 2019 antara laporan realisasi yang disampaikan oleh Pemerintah Provinsi dengan laporan hasil reviu APIP daerah. Berdasarkan PMK nomor 35 tahun 2020, nilai realisasi yang valid dibutuhkan untuk penyaluran Dana Otsus dan DTI tahap I, mengingat

penyalurannya memperhitungkan nilai sisa Dana Otsus dan DTI pada tahun sebelumnya.

Sementara itu, Dana Keistimewaan Provinsi DI Yogyakarta (DIY) telah disalurkan sebesar Rp198,00 miliar atau 15,00 persen dari pagu alokasi, mengamlami penurunan jika dibandingkan dengan capaiannya pada periode yang sama tahun lalu. Capaian ini sejalan dengan meningkatnya alokasi Dana Keistimewaan DIY tahun 2020 sebesar Rp120,00 miliar dibanding tahun sebelumnya. Namun demikian, mewabahnya Covid-19 turut berdampak pada pelaksanaan kegiatan di daerah sehingga membuat daerah sulit untuk memenuhi batasan capaian kinerja dan penyerapan yang telah ditentukan sebagai persyaratan penyaluran.

D. Dana Desa

Hingga 31 Mei 2020, penyaluran Dana Desa telah terealisasi sebesar Rp28,87 triliun atau 40,55 persen dari pagu alokasi. Angka tersebut menunjukkan pencapaian yang lebih tinggi dibandingkan dengan penyaluran Dana Desa yang telah masuk ke Rekening Kas Desa (RKD) di periode yang sama tahun 2019 yaitu sebesar 19,58 persen dari pagu alokasi.

Peningkatan capaian di atas

merupakan hasil dari perubahan kebijakan terkait persentase penyaluran Dana Desa tahap I dari 20 persen menjadi 40 persen. Selain itu, penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2020 dan PMK Nomor 50/PMK.07/2020 tentang Perubahan Kedua atas PMK No. 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa pada tanggal 19 Mei 2020 telah ikut mendorong percepatan penyaluran Dana Desa tahun ini.

Dalam PMK tersebut, diatur mengenai relaksasi persyaratan penyaluran Dana Desa serta prioritas penggunaannya dalam rangka menanggulangi dampak ekonomi dari pandemi Covid-19. Laporan pelaksanaan BLT, misalnya, yang sebelumnya menjadi syarat penyaluran Dana Desa kini ditiadakan sehingga mempermudah Desa untuk segera mengambil langkah-langkah penanggulangan dampak ekonomi dari Covid-19 di wilayahnya.

Halaman Ini Sengaja Dikosongkan

Surat Berharga Negara Sebagai Salah Satu Pendukung Ketahanan APBN Dalam Menghadapi Pandemi

Pembiayaan Utang

Realisasi Pembiayaan Utang hingga akhir Mei 2020 mencapai Rp360,66 triliun, terdiri dari realisasi Surat Berharga Negara sebesar Rp344,98 triliun dan realisasi Pinjaman sebesar negatif Rp8,31 triliun. Realisasi pinjaman terdiri dari penarikan pinjaman dalam negeri sebesar Rp239,4 miliar, penarikan pinjaman luar negeri sebesar Rp30,2 triliun dan pembayaran cicilan pokok pinjaman luar negeri sebesar Rp38,75 triliun. Realisasi penarikan pinjaman yang cukup tinggi diiringi dengan pembayaran cicilan pokok pinjaman luar negeri yang jauh lebih tinggi sehingga menyebabkan realisasi pinjaman neto mencapai angka negatif. Pandemi Covid-19 menyebabkan permasalahan kesehatan dan perlambatan ekonomi yang berdampak kepada menurunnya sumber pendapatan negara,

di sisi lain terjadi peningkatan belanja negara dan pembiayaan yang signifikan. Akibatnya, realisasi pembiayaan utang yang bersumber dari SBN dan pinjaman pun meningkat cukup tinggi.

Pemerintah bersama BI, OJK, dan LPS terus memperketat koordinasi dan bauran kebijakan intensif guna menyelamatkan masyarakat dari masalah kesehatan dan ekonomi akibat pandemi ini. Salah satunya adalah kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang ditujukan untuk menekan angka penularan Covid-19 (Flattening the Curve). Sejak pertengahan Maret lalu, hampir semua sektor, mulai dari pendidikan, ekonomi, peribadatan, pariwisata, dihentikan dan kegiatan mulai dilakukan dari rumah saja menyusul status pandemi Covid-19 sebagai bencana non-alam sampai dengan tanggal 29 Mei 2020 yang

PEMBIAYAAN UTANG

MEI 2020 *Data mengacu pada Perpres 54 Tahun 2020

REALISASI
PEMBIAYAAN UTANG
hingga akhir Mei 2020

Mencapai:
Rp360,66 triliun

Surat Berharga Negara Sebagai Salah Satu Pendukung
Ketahanan APBN Dalam Menghadapi Pandemi.

Realisasi Pembiayaan Utang

(dalam miliar rupiah)

Realisasi Pembiayaan Utang Mei 2020



Rp360.659,5

Realisasi Pembiayaan Utang hingga akhir Mei 2020 mencapai Rp360,66 triliun, terdiri dari realisasi Surat Berharga Negara sebesar Rp344,98 triliun dan realisasi Pinjaman sebesar negatif Rp8,31 triliun.

Surat Berharga Negara (Neto) Mei 2020



Rp344.985,5

Realisasi dari APBN Sumber Pembiayaan Utang

(dalam miliar rupiah)

Pinjaman (Neto) Mei 2020



Rp(8.307,9)

Pinjaman Dalam Negeri (Neto)

(dalam miliar rupiah)



Rp239,4

Penarikan Pinjaman Dalam Negeri (Bruto)



Rp239,4

Pembayaran Cicilan Pokok Pinjaman DN



-

Pinjaman Luar Negeri (Neto)

(dalam miliar rupiah)



Rp(8.547,3)

Penarikan Pinjaman Luar Negeri (Bruto)



Rp30.201,5

Pembayaran Cicilan Pokok Pinjaman LN



Rp(38.748,8)

Pandemi Covid-19 menyebabkan permasalahan kesehatan dan perlambatan ekonomi yang berdampak kepada menurunnya sumber pendapatan negara, di sisi lain terjadi peningkatan belanja negara dan pembiayaan yang signifikan. Akibatnya, realisasi pembiayaan utang yang bersumber dari SBN dan pinjaman pun meningkat cukup tinggi.



dikeluarkan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Kini, setelah hampir tiga bulan sejak ditetapkannya Covid-19 sebagai pandemi global, Pemerintah mengumumkan kebijakan relaksasi PSBB dan mulai menggalakkan tatanan kehidupan normal baru dengan protokol kesehatan yang telah dijalankan pada awal Juni. Dilihat dari kacamata global, situasi kepanikan global pun berangsur mereda. Hal ini ditandai oleh pelonggaran *lockdown* di berbagai negara maju seperti Amerika Serikat, Korea Selatan, dan beberapa negara di Eropa, serta mencuatnya isu terkait vaksin virus corona.

Kondisi pasar SBN periode Mei ini memberikan angin segar di tengah pandemi. Tren *incoming bid* mulai naik kembali semenjak akhir April hingga lelang terakhir, khususnya untuk lelang SUN sejak penurunan yang cukup signifikan akibat pengaruh Covid-19 pada bulan Maret. Pelonggaran *lockdown* dan mulai kembalinya aktivitas perekonomian di berbagai negara maju, turut menggiring sentimen positif pada pasar dan memberikan optimisme investor untuk kembali masuk ke aset pendapatan tetap hingga aset berisiko. Hal ini berdampak pada kembalinya arus modal asing ke Tanah Air dan penurunan tingkat

imbal hasil (*yield*) yang menjadi acuan pasar. *Yield* SBN domestik 10 tahun di pasar sekunder berangsur turun, saat ini sudah mendekati posisi *yield* pada awal tahun 2020. Begitu pula perkembangan *yield* SBN Valas tenor 10 tahun membaik dan turun 11,9 persen dibandingkan awal tahun. Hal ini sejalan dengan mulai masuknya kembali investor asing ke pasar SBN di bulan Mei dan Juni 2020. Meskipun mengalami penurunan *yield*, obligasi Pemerintah Indonesia termasuk yang paling menarik di antara obligasi berdenominasi lokal dari emerging market lainnya., salah satunya karena peringkat kredit yang dimiliki oleh Indonesia berada pada level layak investasi (*investment grade*).

Masuknya kembali asing ke pasar Indonesia tidak lantas berarti porsi SBN dikuasai oleh asing. Pemerintah tetap berupaya untuk mengelola utang pemerintah dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian dan memprioritaskan pendanaan dalam negeri. SBN yang khusus ditujukan untuk WNI di antaranya adalah SBN Ritel yang terdiri dari Saving Bonds Ritel (SBR), Sukuk Tabungan (ST), Sukuk Ritel (SR), dan Obligasi Negara Indonesia (ORI).

Pengelolaan utang Pemerintah dilakukan dengan prudent dan



PENGELOLAAN UTANG PEMERINTAH DILAKUKAN DENGAN PRUDENT DAN AKUNTABEL DI TENGAH TEKANAN COVID-19

POSISI UTANG PER AKHIR MEI 2020 (DALAM TRILIUN RUPIAH)

Rp 5.258,57

Pinjaman
Rp815,66

- Pinjaman Dalam Negeri
Rp9,94
- Pinjaman Luar Negeri
Rp805,72

• Bilateral	316,68
• Multilateral	446,69
• Commercial Banks	42,35
• Suppliers	-

15,51%

84,49%

Surat Berharga Negara
Rp4.442,90

- Domestik
Rp3.248,23

• Surat Utang Negara	2.650,69
• Surat Berharga Syariah Negara	597,54

- Valas
Rp1.194,67

• Surat Utang Negara	970,73
• Surat Berharga Syariah Negara	223,94

DEBT Debt to GDP : 32,09%



Secara umum, peningkatan posisi utang Pemerintah Pusat disebabkan oleh peningkatan kebutuhan pembiayaan akibat pandemi Covid—19 yang melonjak drastis. Masalah kesehatan, penyediaan jaring pengaman sosial, dan pemulihan ekonomi nasional yang menjadi prioritas negara. Sehingga untuk mendukung kebijakan penanganan pandemi, Pemerintah menutupi kekurangan penerimaan negara melalui pembiayaan.

akuntabel di tengah tekanan Covid-19

Posisi utang Pemerintah per akhir Mei 2020 berada di angka Rp5.258,57 triliun dan rasio utang pemerintah terhadap PDB 32,09 persen. Secara nominal, posisi utang Pemerintah Pusat mengalami peningkatan dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu.

Secara umum, peningkatan posisi utang Pemerintah Pusat disebabkan oleh peningkatan kebutuhan pembiayaan akibat pandemi Covid-19 yang melonjak drastis. Masalah kesehatan, penyediaan jaring pengaman sosial, dan pemulihan ekonomi nasional menjadi prioritas negara, sehingga untuk mendukung kebijakan penanganan pandemi, Pemerintah menutupi kekurangan penerimaan negara melalui pembiayaan.

Strategi pembiayaan yang pertama kali digali adalah pos pembiayaan non-utang yang terdiri dari pemanfaatan Saldo Anggaran Lebih (SAL), Pos Dana Abadi Pemerintah, dan dana yang bersumber dari BLU. Selanjutnya, setelah memaksimalkan pembiayaan non-utang, Pemerintah juga menggali

alternatif pembiayaan utang yang fleksibel dari sisi pinjaman maupun SBN.

Pada bulan Mei 2020, Pemerintah telah melakukan penarikan pinjaman dari Asian Development Bank (ADB) dengan skema khusus *countercyclical support facility*. Sesuai dengan namanya, pinjaman tersebut diberikan sebagai bantuan pembiayaan di tengah pandemi untuk merealisasikan kebijakan-kebijakan Pemerintah yang telah diakui oleh ADB, khususnya untuk membantu masyarakat miskin, rentan dan juga perempuan. Selanjutnya, Pemerintah juga sedang menjajaki tambahan pembiayaan dari beberapa lembaga lainnya seperti Islamic Development Bank (IDB), Bank Pembangunan Jerman (KfW), dan Japan International Cooperation Agency (JICA), yang kesemuanya masih dalam proses negosiasi.

Selain itu, Pemerintah juga mengupayakan tambahan pembiayaan dengan meningkatkan porsi penerbitan SBN baik melalui lelang reguler dan lelang tambahan (*Green Shoe Option*), *private placement*, SBN dalam denominasi Valas, dan SBN Ritel. Sebagai opsi paling terakhir, dukungan Bank Indonesia sebagai the last resort dalam hal mekanisme pasar belum mampu memenuhi target pembiayaan.

Pemerintah tetapp berupaya mengelola utang dengan pruden dan akuntabel demi mendukung APBN yang kredibel, utamanya di tengah kejadian extraordinary Covid-19 yang memerlukan *extraordinary effort*.

Halaman Ini Sengaja Dikosongkan

